

**UPAYA PENGGALANGAN UNIT POLITIK SATINTELKAM
GUNA MEWUJUDKAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN
PEMILIHAN KEPALA DESA
DI WILAYAH HUKUM POLRES MAGELANG**



TUGAS AKHIR

**Diajukan untuk Melengkapi
Persyaratan Memperoleh Gelar
Sarjana Terapan Ilmu Kepolisian (S.Tr.K)**

Oleh:

**MUHAMMAD HABIB KEVIN SETIYAWAN
BRIGTAR NO. AK 19.144**

**AKADEMI KEPOLISIAN
SEMARANG
2023**

ABSTRAK
**UPAYA PENGGALANGAN UNIT POLITIK SATINTELKAM
GUNA MEWUJUDKAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN
PEMILIHAN KEPALA DESA DI WILAYAH HUKUM
POLRES MAGELANG**

Muhammad Habib Kevin, 19.144, kevinsetiawan309@gmail.com

Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) merupakan kegiatan pesta demokrasi dengan kerawanan yang tinggi. Pada Pilkades tahun 2016, 2019, dan 2022 selalu terjadi gangguan kamtibmas sehingga memunculkan indikator permasalahan pada upaya pre-emptif yaitu pada kegiatan penggalangan Unit Politik Satintelkam Polres Magelang.

Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif yaitu menggunakan deskriptif analisis sehingga teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu wawancara, observasi, dan studi dokumen. Fokus dari penelitian ini adalah optimalisasi penggalangan Unit Politik Satintelkam guna mewujudkan keamanan dan ketertiban pilkades di wilayah hukum Polres Magelang. Data primer didapatkan dari wawancara dengan anggota Unit Politik Satintelkam dan Badan Permusyawaratan Desa yang melaksanakan Pilkades. Data sekunder diperoleh melalui pengkajian terhadap dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggalangan Unit Politik Satintelkam terkait rangkaian kegiatan Pilkades masih belum optimal. Pelaksanaan penggalangan dengan menunggu adanya laporan masyarakat belum sesuai dengan kegiatan intelejen yang merupakan bentuk upaya pre-emptif.

Kata Kunci: Upaya, Penggalangan, Satintelkam, Unit Politik, Pilkades

ABSTRACT
**EFFORT OF SATINTELKAM POLITICAL UNIT RAISING TO REALIZE
SECURITY AND ORDER VILLAGE HEAD ELECTION IN THE
JURISDICTION OF MAGELANG POLRES**

Muhammad Habib Kevin, 19.144, kevinsetiawan309@gmail.com

Village Head Election (Pilkades) is a democratic party activity with high vulnerability. In the 2016, 2019, and 2022 elections, there were always kamtibmas disturbances, which raised indicators of problems in pre-emptive efforts, namely in the raising activities of the Satintelkam Political Unit of the Magelang Police.

The research method used is a qualitative method that is using descriptive analysis, so that the data collection techniques used are interviews, observation, and document studies. The focus of this research is optimizing the formation of the Satintelkam Political Unit to realize security and order Pilkades in the jurisdiction of the Magelang Police. Primary data was obtained from interviews with members of the Political Unit of the Satintelkam and the Village Consultative Body who are carrying out the Pilkades. Secondary data was obtained through a review of documents related to the object of research.

The results showed that the raising of the Satintelkam Political Unit related to the series of Pilkades activities was still not optimal. The implementation of raising by waiting for community reports has not been in accordance with intelligence activities which are a form of pre-emptive efforts.

Keywords: Effort, Raising, Satintelkam, Political Unit, Pilkades

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau sering disebut Polri merupakan organisasi yang memiliki peran dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas). Sesuai dengan pasal 13 UU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menjelaskan tugas pokok Polri, yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Dari tugas pokok Polri tersebut, poin utamanya terletak pada memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat karena mengemban fungsi pencegahan adanya gangguan Kamtibmas. Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat ini juga masuk ke dalam 16 program Presisi Kapolri saat ini Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, M.Si tepatnya pada program presisi ke-5, yaitu pemantapan kinerja pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Program pemantapan kinerja pemeliharaan Kamtibmas ini diberlakukan di seluruh satuan wilayah Polri salah satunya pada wilayah hukum Polres Magelang.

Kabupaten Magelang menjadi batas daerah sebelah selatan Provinsi Jawa Tengah dengan Kabupaten Sleman yang masuk Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kabupaten Magelang yang berada di ujung bagian selatan, cenderung memiliki tingkat Sumber Daya Manusia (SDM) yang rendah sehingga memiliki kerawanan mudah terprovokasi oleh informasi – informasi tanpa mencari kebenaran fakta yang ada. Selain itu, wilayah Kabupaten Magelang menjadi jalur transportasi lintas provinsi sehingga keberagaman masyarakat yang beraktivitas di wilayah hukum Polres Magelang ini meningkat. Keadaan masyarakat yang majemuk dan kualitas penduduk yang tergolong rendah akan menciptakan potensi-potensi timbulnya konflik baik antar warga maupun antara warga dengan pendatang di wilayah hukum Polres Magelang.

Kondisi masyarakat di wilayah Kabupaten Magelang yang dinamis ini memerlukan peran aktif masyarakat dalam mencegah potensi gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat. Selain itu, kewajiban yang diemban salah satu aparat pemerintahan yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dijelaskan pada pasal 4 UU Nomor 2 Tahun 2002 bahwa tujuan dibentuknya Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

Mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Keamanan dan ketertiban masyarakat menjadi salah satu dari tugas pokok Polri. Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Polri melakukan kegiatan maupun operasi kepolisian yang dibagi menjadi 3 cara bertindak, yaitu *preemptif*, *preventif*, dan *represif*. Dalam upaya mendeteksi adanya potensi gangguan Kamtibmas dan melakukan upaya pencegahan awal, fungsi teknis Intelkam memiliki peran penting dalam melaksanakan tindakan *preemptif*. Fungsi teknis Intelkam memegang peranan penting untuk memberikan informasi kepada pimpinan sebagai bentuk penentu kebijakan yang akan diambil oleh pimpinan, tak terkecuali yang dilakukan oleh Satuan Intelejen Keamanan (Satintelkam) Polres Magelang.

Satintelkam Polres Magelang dibagi menjadi 4 unit sesuai bidang pelaksanaan tugasnya. Unit 1 menangani bidang politik, unit 2 menangani bidang ekonomi, unit 3 menangani bidang sosial budaya, dan unit 4 menangani bidang keamanan. Pada penelitian yang dilakukan penulis yaitu terkait rangkaian kegiatan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) menjadi tanggung jawab dari Unit Politik Satintelkam Polres Magelang. Seluruh kegiatan intelejen baik itu penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan yang berkaitan dengan Pilkades dilakukan oleh anggota Unit Politik Satintelkam.

Pilkades merupakan pesta demokrasi rakyat untuk memilih kepala desa yang dilaksanakan 6 tahun sekali pada wilayah otonomi desa. Pilkades merupakan pesta demokrasi rakyat yang memiliki kerawanan paling tinggi dibandingkan Pemilihan Kepala Daerah maupun Pemilihan Presiden. Hal ini dikarenakan antara pemilih dan calon kepala desa saling mengenal satu sama lain yang mengakibatkan mudah terjadinya perselisihan apabila terdapat penyimpangan yang dilakukan salah satu pihak. Selain itu, pendukung dan tim sukses juga mudah terprovokasi dikarenakan wilayah desa cenderung memiliki kualitas SDM yang rendah. Kerawanan dari Pilkades ini menjadi atensi dari pimpinan sehingga perlu dilakukan penggalangan intelejen oleh Unit Politik Satintelkam Polres Magelang. Tujuan dari penggalangan ini adalah menciptakan kondisi sesuai dengan kepentingan Polri yaitu keamanan dan ketertiban masyarakat pada kegiatan Pilkades.

Berdasarkan Peraturan Kepala Bagian Intelejen Keamanan (Perkabik) Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penggalangan Intelejen Kepolisian Negara Republik Indonesia, penggalangan intelejen merupakan segala usaha, pekerjaan, dan kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis dan terencana oleh sarana intelejen untuk membuat, menciptakan, mengubah suatu kondisi dalam masyarakat sehingga mencapai keadaan menguntungkan terhadap pelaksanaan tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pada Pasal 4 Perkabik No 3 Tahun 2013 menjelaskan prinsip-prinsip penggalangan intelejen, yaitu:

1. Kerahasiaan, yaitu penggalangan dilakukan secara tertutup dan hanya diketahui oleh orang tertentu atau yang bersangkutan saja.
2. Ketelitian, yaitu penggalangan dilakukan secara cermat dan saksama.
3. Kedisiplinan, yaitu penggalangan dilakukan dengan dilandasi oleh kesadaran terhadap semua peraturan dan tata tertib yang telah ditetapkan.
4. Keamanan, yaitu penggalangan dilakukan secara berhati-hati.

-
5. Keberanian, yaitu penggalangan dilakukan dengan hati yang mantap dan rasa percaya diri dalam menghadapi kesulitan.
 6. Mengutamakan sumber informasi di sasaran utama (primer) secara langsung dan hindari informasi kedua (sekunder).

Pilkades dilaksanakan serentak pada tanggal 6 November 2022 dan diselenggarakan di 14 kecamatan terdiri atas 23 desa yang berada di wilayah hukum Polres Magelang. Tahapan pelaksanaan Pilkades telah dimulai sejak bulan Mei tahun 2022 sehingga dilakukan upaya penggalangan oleh Unit Politik Satintelkam untuk menciptakan kondisi keamanan dan ketertiban. Kerawanan Pilkades di wilayah hukum Polres Magelang juga dapat dilihat dari analisa Pilkades sebelumnya. Sebagai contoh pada Pilkades 2016, di desa Sengi terdapat perselisihan yang mengakibatkan demonstrasi oleh warga terhadap panitia Pilkades dikarenakan adanya ijazah dari calon kepala desa yang palsu. Selanjutnya pada pelaksanaan Pilkades tahun 2022, terjadi beberapa kejadian yang menimbulkan gangguan Kamtibmas. Yang pertama, adanya aduan dari masyarakat Desa Blondo yang melaporkan ke Polres Magelang bahwa telah terjadi adanya indikasi suap dari salah satu calon Kepala Desa Blondo yaitu calon nomor 4 Aan Sudarno kepada masyarakat. Namun, setelah adanya klarifikasi dan rapat langsung di Balai Pemerintahan Desa Blondo ternyata laporan tersebut bukan unsur suap. Hal ini terjadi karena adanya usaha dari calon lain yang bekerja sama menjatuhkan calon nomor 4 karena kecemburuan ekonomi. Yang kedua, telah terjadi aksi konvoi kendaraan bermotor setelah pemungutan suara yang dilakukan di Kecamatan Salam. Aksi konvoi ini dilakukan untuk merayakan kemenangan dari Kepala Desa Sucen, Kecamatan Salam. Dari hasil Pulbaket statistik desa yang memiliki kerawanan tinggi berdasarkan telaah dokumen laporan informasi Pilkades sebelumnya, wawancara dengan anggota Unit Politik dan panitia Pilkades, dan observasi lapangan terhadap Balai Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai berikut.

Tabel 1.1
Pembagian Desa yang Memiliki Kerawanan

No	Kecamatan	Jumlah desa	Nama desa	DPT	TPS
1.	Grabag	3	Banaran	4.576	14
2.	Dukun	1	Sengi	3.395	8
3.	Mertoyudan	1	Banyurojo	7.687	20
5.	Salam	2	Sucen	3.563	8
6.	Mungkid	1	Blondo	4.439	9

Sumber: Perkiraan Singkat (Kirkat) Pilkades 2022

Berdasarkan data tabel tersebut seharusnya perlu dilakukan penggalangan yang lebih intensif pada desa yang memiliki kerawanan lebih dari desa yang lain. Akan tetapi, pada faktanya tidak dilakukan penggalangan oleh Unit Politik Satintelkam Polres Magelang guna mewujudkan keamanan dan ketertiban Pilkades sehingga dalam pelaksanaan Pilkades selalu terjadi gangguan Kamtibmas.

Penjelasan latar belakang di atas, penggalangan Unit Politik Satintelkam Polres Magelang yang masih menunggu adanya laporan dari masyarakat ataupun kejadian insidental seperti yang terjadi di Desa Blondo menunjukkan bahwa penggalangan Unit Politik Satintelkam Polres Magelang masih belum optimal. Alasan dari pengambilan permasalahan ini karena Pilkades merupakan kegiatan dengan kerawanan yang tinggi sehingga perlu adanya penggalangan yang dilaksanakan secara rutin sesuai pasal 1 angka 7 Perkabik No3 Tahun 2013 tentang penggalangan intelejen Satintelkam.

Atas dasar tersebut penelitian ini dilakukan sebagai penulisan tugas akhir yang berjudul, "Upaya Penggalangan Unit Politik Satuan Intelkam guna Mewujudkan Keamanan dan Ketertiban Pemilihan Kepala Desa di Wilayah Hukum Polres Magelang". Penulisan tugas akhir ini diharapkan dapat memberikan tambahan ilmu serta menjadi solusi permasalahan di institusi Polri khususnya Unit Politik Satintelkam Polres Magelang dalam penggalangan guna mewujudkan keamanan dan ketertiban wilayah hukum Polres Magelang.

1.2 Permasalahan

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu “Mengapa Penggalangan Unit Politik Satuan Intelkam guna Mewujudkan Keamanan dan Ketertiban Pemilihan Kepala Desa di Wilayah Hukum Polres Magelang Masih Belum Optimal?”. Rumusan masalah di atas diuraikan menjadi beberapa persoalan sebagai berikut

- a. Bagaimana Sumber Daya Organisasi (SDO) Unit Politik Satintelkam Polres Magelang dalam melaksanakan penggalangan intelegen guna mewujudkan keamanan dan ketertiban Pemilihan Kepala Desa?
- b. Bagaimana sistem metode kerja penggalangan Unit Politik Satintelkam guna mewujudkan keamanan dan ketertiban Pemilihan Kepala Desa di wilayah hukum Polres Magelang?

1.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud dari pelaksanaan penelitian ini yaitu mendeskripsikan permasalahan secara cermat untuk mengoptimalkan penggalangan Unit Politik Satintelkam guna mewujudkan keamanan dan ketertiban Pemilihan Kepala Desa di wilayah hukum Polres Magelang.

b. Tujuan

Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan penggalangan Unit Politik Satintelkam guna mewujudkan keamanan dan ketertiban Pemilihan Kepala Desa di wilayah hukum Polres Magelang. Penjabaran tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Sumber Daya Organisasi Penggalangan Unit Politik Satintelkam guna mewujudkan keamanan dan ketertiban Pilkades di wilayah hukum Polres Magelang.
2. Sistem metode kerja penggalangan Unit Politik Satintelkam guna mewujudkan keamanan dan ketertiban Pemilihan Kepala Desa di wilayah hukum Polres Magelang.

1.4 Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penelitian ini yaitu penggalangan Unit Politik Satintelkam guna mewujudkan keamanan dan ketertiban Pemilihan Kepala Desa. Tujuan pembatasan ruang lingkup ini agar penelitian dapat terlaksana dengan tepat sasaran dan cakupan data yang didapat tidak terlalu luas. Penelitian ini mencakup subjek penelitian dan objek penelitian terkait keamanan dan ketertiban Pilkades di wilayah hukum Polres Magelang. Subjek penelitian selaku pelaksana dan pengendali tugas yang berhubungan langsung dengan keamanan dan ketertiban Pilkades serta objek penelitian berupa kumpulan data faktual guna menemukan fakta-fakta yang ada di lapangan sehingga penelitian ini dapat terlaksana dengan baik.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

a. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan suatu metode dalam memecahkan suatu permasalahan. Sebagaimana tujuan penelitian ini yaitu mengoptimalkan penggalangan Unit Politik Satintelkam guna mewujudkan keamanan dan ketertiban Pilkades, maka kegiatan yang dilakukan yaitu menganalisis data dokumen, memahami Perkabik No 3 Tahun 2013 terkait penggalangan, dan observasi kegiatan penggalangan di lapangan. Oleh karena itu, pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif.

Menurut Denzin dan Lincoln (dalam Moelong, 2019:5) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, yang bertujuan menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Berdasarkan pengertian tersebut, latar ilmiah menjadi hal yang sangat diperhatikan agar hasil penelitian dapat menafsirkan fenomena dan yang dapat dimanfaatkan dari penelitian kualitatif adalah penggunaan berbagai macam metode

penelitian. metode penelitian pada penelitian kualitatif yang paling sering digunakan yaitu wawancara, pengamatan, dan studi dokumen.

Penggunaan metode kualitatif dalam penelitian ini berdasarkan pada pengumpulan data dan observasi terhadap tahapan pelaksanaan Pilkades di Polres Magelang yang sangat dinamis. Pelaksanaan penggalangan yang dilakukan Unit Politik Satintelkam di lapangan memerlukan teknik pendekatan yang berbeda karena karakter masyarakat di setiap desa yang akan melaksanakan Pilkades. Hal tersebut sesuai dengan pendapat (Sugiyono, 2022:4) yang mengatakan bahwa “Penelitian kualitatif merupakan proses eksplorasi serta memahami perilaku individu, masalah sosial, dan masalah kemanusiaan. Permasalahan dalam suatu penelitian ini bersifat sementara dan selalu berkembang sesuai situasi dan kondisi di lapangan”.

Kelebihan dari metode kualitatif dalam suatu penelitian yaitu memiliki sifat eksploratif dalam mencari data, menggunakan teori yang sesuai dengan kondisi lapangan, dan membahas solusi permasalahan dengan lebih spesifik sesuai dengan perkembangan di lapangan.

b. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang relevan dengan metode kualitatif yaitu menggunakan deskriptif analisis. Hal ini didukung oleh pendapat Bogdan dan Taylor (dalam Moelong, 2019:4) yang mengatakan bahwa metode kualitatif merupakan prosedur penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan data yang deskriptif melalui analisis secara langsung terhadap dokumen tertulis, lisan, dan perilaku orang yang diamati. Deskriptif analisis menjelaskan permasalahan dan objek yang diteliti secara sistematis serta didukung oleh data faktual yang ada di lapangan. Hubungan dengan penelitian ini yaitu penggalangan Unit Politik Satintelkam hanya dapat diamati melalui perilaku anggota Unit Politik Satintelkam ketika melaksanakan penggalangan, wawancara langsung terhadap narasumber yang berkompeten sesuai variabel permasalahan sehingga didapatkan data primer yang memiliki validitas data maksimal.

Menurut Creswell (2012 dalam Sugiyono, 2022:5) salah satu jenis penelitian kualitatif yaitu fenomenologis dimana penulis melakukan pengumpulan data dengan observasi terhadap sasaran untuk mengetahui pengalaman kerja dari sasaran yang merupakan anggota Unit Politik Satintelkam. Pengumpulan data dengan cara terjun langsung ke lapangan yaitu pelaksanaan penggalangan, dibutuhkan penelitian lapangan (*field research*). Pelaksanaan penggalangan memerlukan pengamatan secara langsung terhadap fenomena yang dihadapi sehingga mampu melihat permasalahan secara langsung dan memahami cara menemukan solusi permasalahan.

1.5.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan pengerucutan terhadap permasalahan yang akan dibahas oleh penulis sehingga pembahasan yang dilakukan tidak melebar diluar variabel yang ditentukan. Dalam penelitian yang dilakukan, fokus penelitian berupa permasalahan lalu dijabarkan menjadi persoalan-persoalan lebih rinci guna mempermudah mendapatkan data sesuai persoalan penelitian yang ditentukan. Proses mendapatkan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumen.

Fokus penelitian yang diambil dalam penelitian ini yaitu upaya penggalangan Unit Politik Satintelkam guna mewujudkan keamanan dan ketertiban pilkades di wilayah hukum Polres Magelang. Pilkades di wilayah hukum Polres Magelang menjadi potensi gangguan karena memiliki kerawanan yang tinggi sehingga perlu peran intensif penggalangan intelejen sebagai upaya cipta kondisi keamanan dan ketertiban berlangsungnya tahapan Pilkades. Penggalangan yang dilakukan Unit Politik Satintelkam Polres Magelang menjadi fokus penelitian, apakah dalam pelaksanaannya sudah sesuai dengan Perkabik No 3 Tahun 2013 atau sebaliknya mengalami hambatan pengoptimalan penggalangan terkait Pilkades.

1.5.3 Lokasi Penelitian

Menurut Spradley dalam (Sugiyono, 2022:110), Penelitian Kualitatif memiliki 3 komponen penting yaitu *place* (tempat), *actor* (pelaku), dan *activities* (aktivitas). Ketiga komponen tersebut menjadi objek penelitian yang dilakukan observasi oleh penulis dalam penelitian kualitatif. Lokasi penelitian yang dilakukan berada di Kabupaten Magelang dalam wilayah hukum Polres Magelang dengan *actor* (pelaku) yaitu Unit Politik Satintelkam Polres Magelang dan *activities* (aktivitas) yaitu penggalangan intelegen terkait rangkaian kegiatan Pilkada di wilayah hukum Polres Magelang.

1.5.4 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian kualitatif memaksimalkan kegiatan yang terjun langsung di lapangan, bukan didominasi dengan penggunaan angka suatu data. Sementara itu, data yang diteliti berupa gejala, kejadian, peristiwa, tindakan, dan kata-kata melalui pengamatan, catatan lapangan dan wawancara. Selain data yang di atas, disebut sebagai data tambahan yang mendukung suatu penelitian lapangan yaitu dokumen dan lain-lain. Penjelasan di atas didukung oleh Lofland dan Lofland (dalam Moleong, 2019:157) "Sumber data dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya merupakan data tambahan seperti dokumen dan lain-lain". Berdasarkan pernyataan di atas, diperoleh informasi bahwa sumber data dapat menggunakan sumber data primer maupun sumber data sekunder. Sumber data primer adalah sumber data yang memberikan data secara langsung kepada pengumpul data, sedangkan sumber data sekunder yaitu sumber data diberikan secara tidak langsung kepada pengumpul data, contohnya diberikan melalui orang lain ataupun melalui dokumen. (Sugiyono, 2022:104).

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang didapatkan secara langsung berupa kata-kata maupun tindakan. Dalam mendapatkan sumber data primer, setiap perbuatan dan kata-kata yang diamati dari narasumber yang akan kita wawancara dapat dilakukan pencatatan secara

detail maupun perekaman video saat pelaksanaan wawancara untuk meningkatkan keobjektifan data yang diperoleh. Berikut ini sumber data primer dalam penelitian penggalangan Unit Politik Satintelkam terkait pelaksanaan Pilkades di wilayah hukum Polres Magelang, yaitu:

- 1) Kapolres Magelang, AKBP Muhammad Sajarod Zakkun S.H., S.I.K.
- 2) Kasat Intelkam Polres Magelang, AKP Suprijanto S.H.
- 3) Kepala Unit Politik Satintelkam Polres Magelang, AIPTU Tri Laksana Sumaedi S.Pd.
- 4) Anggota Unit Politik Satintelkam Polres Magelang
 - a) Bripka Heri Wijayanto S.H
 - b) Bripka Setiadi Prasetyo
 - c) Brigadir Yoga Pinandita Suharsono
 - d) Brigadir Paskibraka Putra Ginanjar S.H
 - e) Brigadir Wisnu Prabowo S.H
 - f) Brigadir Rhizal Septian Haryono S.H

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang tidak didapatkan secara langsung dari narasumber melainkan dari data dokumen tertulis. Dokumen tertulis tersebut seperti sumber buku dan majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen pribadi, dan dokumen resmi. (Moleong, 2019:159). Data sekunder diperoleh melalui pengkajian terhadap dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian. Sumber data sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia
2. Peraturan Kabaintelkam Polri No. 3 Tahun 2013 tentang Penggalangan Intelejen Polri
3. Hanjar FT Intelkam Akademi Kepolisian 2021
4. Intel Dasar Polres Magelang Tahun 2021

Selain mengkaji sumber data sekunder di atas, data sekunder juga dapat diperoleh dari Laporan Informasi terkait Pilkadaes 2022, Perkiraan Singkat (Kirkat) dari Polsek yang di wilayahnya melaksanakan Pilkadaes, Rencana Pengamanan (Renpam) dari Bagian Operasional, dan data personel Intelkam di wilayah hukum Polres Magelang baik yang berada di Polres Magelang maupun di Polsek yang berada di wilayah hukum Polres Magelang.

1.5.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data harus tepat sesuai dengan kebutuhan dan situasi kondisi lapangan karena sangat berpengaruh untuk mendapatkan data yang akurat dan objektif. Kualitas pengumpulan data dipengaruhi metode yang digunakan dalam mengumpulkan data. Menurut Catherine Marshall dan Gretchen B. Rossman (dalam Sugiyono, 2022:105) menyatakan bahwa metode utama yang dapat digunakan dalam penelitian kualitatif untuk mengumpulkan informasi yaitu observasi secara langsung, wawancara mendalam, dan menelaah dokumen. Berikut akan dijelaskan lebih rinci terkait teknik pengumpulan data.

a. Observasi

Dalam teknik pengumpulan data dengan pengamatan atau observasi, objek yang diamati tidak hanya pada orang, tetapi juga pada objek lingkungan sekitarnya. Sebagaimana dalam Sugiyono (2022:106) menyatakan bahwa pengumpulan data dengan menggunakan teknik observasi sangat cocok pada penelitian yang berhubungan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam, dan responden yang diamati tidak luas. Observasi dilakukan dengan mengamati secara detail dan mencatat setiap fenomena yang terjadi dengan sistematis untuk mendapatkan data yang objektif sesuai kebenaran di lapangan.

Observasi dalam penelitian ini dilakukan terhadap upaya penggalangan Unit Politik Satintelkam untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban Pilkadaes di wilayah hukum Polres Magelang. Dalam penelitian ini, akan dilakukan observasi secara mendalam terhadap kegiatan

penggalangan Unit Politik Satintelkam terkait rangkaian kegiatan Pilkades sehingga penulis mengetahui kekurangan dalam pelaksanaan penggalangan.

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara proses tanya jawab secara lisan antara pewawancara dengan narasumber menggunakan pertanyaan yang sesuai bidang keahlian dari terwawancara. Menurut Estenberg (dalam Sugiyono, 2022:114) Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.

Dalam penelitian ini, pengumpulan data ini menggunakan wawancara tak terstruktur. Menurut Sugiyono (2022:114) Wawancara tak terstruktur merupakan wawancara yang bebas dan penulis hanya menggunakan pedoman wawancara secara garis besar. Dalam wawancara ini, pewawancara mengajukan pertanyaan secara fleksibel untuk mendapatkan informasi yang mendalam tetapi tetap sesuai dengan kapabilitas responden. Wawancara tak terstruktur ini sangat efektif untuk mengetahui permasalahan terkait perkecualian, penyimpangan, penafsiran yang tidak tepat, dan kelemahan dari objek penelitian ini. Wawancara akan dilakukan kepada pihak sebagai berikut:

1. KaPolres Magelang
2. Kasat Intelkam Polres Magelang
3. Kepala Unit Politik Satintelkam Polres Magelang
4. Anggota Satintelkam Unit Politik Polres Magelang

c. Telaah Dokumen

Telaah dokumen adalah proses pengumpulan data melalui analisis dari dokumen-dokumen yang memiliki korelasi dengan penelitian yang dilakukan. Analisis dokumen ini dapat dimanfaatkan untuk pengujian dan penafsiran sebagai perbandingan dengan kondisi faktual yang ada di lapangan. Menurut Guba dan Lincoln (dalam Moelong, 2019) Alasan yang

dapat dipertanggung-jawabkan penggunaan dokumen dalam suatu penelitian yaitu:

1. Dokumen merupakan sumber yang stabil, kaya, dan mendorong.
2. Dapat digunakan sebagai bukti suatu pengujian.
3. Bersifat alamiah dan sesuai dengan konteks.
4. Dokumen relative mudah untuk didapatkan.
5. Dapat memperluas pengetahuan terkait penelitian yang dilakukan.

Adapun dokumen-dokumen yang diperlukan sebagai sumber data dalam penelitian ini yaitu:

1. Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia
2. Peraturan Kabaintelkam Polri No. 3 Tahun 2013 tentang Penggalangan Intelejen Polri
3. Hanjar FT INtelkam Akademi Kepolisian 2021
4. Intel Dasar Polres Magelang Tahun 2021

1.5.6 Validitas Data

Menurut Sugiyono (2022:181) Validitas data merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang didapatkan oleh peneliti. Data yang valid merupakan data yang tidak berbeda antara data yang dilaporkan peneliti dengan data yang terjadi dalam penelitian. Sebaliknya, data yang dinyatakan tidak valid yaitu apabila data yang terjadi pada objek penelitian di lapangan berbeda dengan yang dilaporkan oleh peneliti.

Penelitian yang dilakukan saat ini menggunakan uji kredibilitas berupa triangulasi data untuk mengetahui validitas data yang dilaporkan oleh panulis. William Wiersma (dalam Sugiyono, 2022:189) mengatakan bahwa Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini merupakan pengecekan data dari berbagai cara dan berbagai waktu. Maka dapat disimpulkan dalam triangulasi terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu.

a. Triangulasi Sumber

Tujuan dari triangulasi teknik yaitu menguji kredibilitas data dengan cara pengecekan data yang didapatkan melalui berbagai sumber yang objektif dan terpercaya.

b. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik dilakukan untuk menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama tetapi dengan teknik yang berbeda.

c. Triangulasi waktu

Dilakukan untuk menguji kredibilitas data dengan cara melaksanakan pengecekan pada waktu dan situasi yang berbeda.

Pada penelitian yang dilakukan saat ini, triangulasi yang digunakan adalah triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Penggunaan triangulasi sumber dilakukan dengan cara membandingkan data yang didapatkan melalui dokumen dengan melakukan wawancara secara langsung yang dilakukan pada narasumber yang berbeda. Penggunaan triangulasi sumber berbeda seperti dari Kapolres Magelang, Kasat Intelkam Polres Magelang, anggota Unit Politik Satintelkam sebagai pelaksana kegiatan, Kapolsek wilayah yang melaksanakan Pilkades, panitia Pilkades tiap kecamatan, dan pemerintah desa yang melaksanakan Pilkades. Penggunaan triangulasi teknik dilakukan pada sumber informasi yang sama tetapi menggunakan teknik yang berbeda. Teknik yang digunakan dalam mendapatkan informasi yaitu observasi, wawancara, dan telaah dokumen.

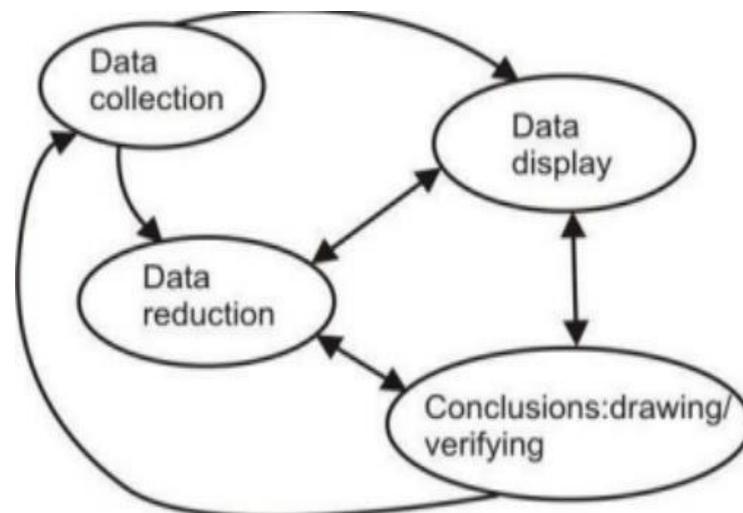
1.5.7 Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif menurut Bogdan dalam (Sugiyono, 2022:130) yaitu proses mencari dan menyusun data secara sistematis dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan lainnya sehingga mudah dipahami dan hasil penelitiannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengklasifikasikan data, membentuk suatu pola yang terstruktur, memilih data penting yang akan digunakan, dan membuat simpulan yang mudah dipahami orang lain.

Dalam penelitian di Polres Magelang, data yang diperoleh yaitu hasil wawancara dan observasi berupa catatan tertulis dan rekaman video percakapan. Selanjutnya, data tersebut diolah untuk mendapatkan permasalahan sesuai fakta di lapangan dan temuan lain yang didapatkan selama pelaksanaan penelitian terhadap penggalangan unit Politik maupun panitia penyelenggara Pilkadaes 2022.

Analisis data kualitatif yang digunakan penulis ini berdasarkan pendapat dari Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2022:133) bahwa aktivitas analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berkesinambungan hingga tuntas. Dalam analisis data, dibagi menjadi 3 (tiga) kegiatan yaitu (1) *Data Collection* (pengumpulan data); (2) *Data reduction* (reduksi data); (3) *Data Display* (penyajian data); dan (4) *Conclusion drawing/verifying* (penarikan kesimpulan).

Gambar 1.1
Komponen dalam Analisis Data (interactive Model)



Sumber: Sugiyono, 2022

a. Pengumpulan Data

Pengumpulan data menjadi kegiatan utama yang dilakukan dalam penelitian. Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dapat dilakukan melalui kegiatan observasi, wawancara, dan penelaahan dokumen atau menggunakan gabungan ketiganya (triangulasi). Pengumpulan data

dilakukan dalam kurun waktu tertentu sehingga data yang dikumpulkan terarah dan melimpah sesuai yang dibutuhkan. Tahapan awal penulis dalam melakukan penjelajahan secara universal terhadap objek yang diteliti, semua dilakukan proses dokumentasi (Sugiyono, 2022:134).

b. Reduksi Data

Menurut Sugiyono (2022:136) Reduksi data merupakan proses berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan, kekeluasaan, dan kedalaman wawasan yang tinggi. Proses reduksi data ini dilakukan dalam suatu penelitian setelah kegiatan pengumpulan data yang melimpah. Dengan banyaknya data yang didapatkan di lapangan maka perlu ada proses analisis data melalui reduksi data sehingga didapatkan data yang rinci dan lebih terstruktur sesuai yang dibutuhkan dalam penelitian. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal yang pokok, memfokuskan pada hal yang penting, dan mencari tema serta polanya. Dalam mereduksi data, penulis akan dipandu oleh teori untuk mencapai tujuan yaitu temuan permasalahan yang ada di lapangan. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah penulis untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya ataupun mencari kembali bila diperlukan.

c. Penyajian Data

Langkah selanjutnya setelah melakukan reduksi data adalah penyajian data. Penyajian data pada penelitian kualitatif dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan lainnya melalui penyajian data tersebut, maka data tersusun dalam pola hubungan yang mudah dipahami. Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2022:137) menyatakan bahwa penyajian data yang paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah teks yang bersifat naratif. Penyajian data dalam bentuk teks naratif ini memudahkan penulis menggambarkan permasalahan yang terjadi di lapangan dan menarik simpulan dari penelitian yang dilakukan.

d. Penarikan kesimpulan

Langkah terakhir dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2022:141) yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, tetapi apabila ditemukan bukti-bukti yang menguatkan maka kesimpulan ini bisa menjadi kesimpulan yang kredibel. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat menjawab permasalahan yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak karena permasalahan dalam penelitian kualitatif yang ada di lapangan selalu berkembang. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang belum ada sebelumnya.

BAB II

TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Tinjauan kepustakaan merupakan sarana untuk menyelesaikan permasalahan dalam penelitian secara terarah sesuai dengan konsep dan data empiris yang ada. Dengan adanya tinjauan kepustakaan maka diharapkan penggunaan teori dan konsep harus tepat sasaran sebagai pisau analisis penyelesaian permasalahan yang ditemukan oleh penulis. Selain itu, tinjauan kepustakaan menjelaskan pengalaman, jurnal, dan data hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti terdahulu sebagai gambaran bagi penulis dalam melakukan penelitian. Dalam suatu penelitian, tinjauan kepustakaan dibagi menjadi kepustakaan penelitian, kepustakaan konseptual, dan kerangka berpikir.

2.1 Kepustakaan Penelitian

Kepustakaan penelitian menyajikan berbagai hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya serta relevan dengan penelitian penulis sebagai bentuk referensi bagi penulis. Kepustakaan penelitian berisi informasi mengenai topik permasalahan penulis terdahulu serta adanya persamaan dan perbedaan antara penelitian penulis dengan hasil penelitian terdahulu. Penulis menyajikan 3 hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

- a. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Derial Ramadhan, lulusan Akademi Kepolisian tahun 2019 dengan judul “Peran Sat Intelkam dalam Pelaksanaan Penggalangan Intelijen guna Mencegah Pelanggaran Pemilu Presiden 2019 Di Kabupaten Magelang”. Maksud dari penelitian tersebut adalah mengetahui peran Satintelkam melalui penggalangan dalam mencegah pelanggaran untuk mewujudkan terselenggaranya Pemilu Presiden 2019 yang aman dan tertib.

Persamaan antara hasil penelitian Deriel Ramadhan (2019) dengan penelitian yang dilakukan saat ini adalah penggunaan metode penelitian kualitatif. Selain itu, fokus penelitian yaitu pada penggalangan intelejen di wilayah hukum Polres Magelang. Sementara itu, perbedaan antara kedua penelitian ini adalah pada fokus penelitiannya yaitu penelitian yang dilakukan Deriel Ramadhan (2019) ini mengenai penggalangan intelejen untuk mencegah pelanggaran Pemilu Presiden 2019 sedangkan penelitian yang dilakukan penulis mengenai Penggalangan intelejen dalam mendukung keamanan terselenggaranya Pilkades.

- b. Penelitian yang dilakukan oleh M. Ari Nuzul, lulusan Akademi Kepolisian tahun 2018 dengan judul “Peran Satuan Intelkam dalam Melaksanakan Penggalangan Intelejen guna Mencegah Radikalisme di Polres Purwakarta”. Maksud dari penelitian tersebut adalah mengetahui apa saja peran Penggalangan Intelejen untuk mencegah radikalisme yang ada di Polres Purwakarta. Persamaan dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah penggunaan metode kualitatif dalam penelitian. Selain itu, fokus penelitian membahas penggalangan yang dilakukan oleh Satintelkam yang merupakan salah satu upaya deteksi dini. Disamping itu, terdapat perbedaan antara penelitian M. Ari Nuzul (2018) dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu fokus penelitian antara kedua penulis. Penelitian M. Ari Nuzul (2018) fokus pada penggalangan intelejen guna mencegah radikalisme sedangkan penelitian yang dilakukan penulis fokus pada penggalangan Unit Politik Satintelkam dalam mendukung keamanan dan ketertiban terselenggaranya Pilkades. Selain itu, lokasi penelitian antara kedua penulis juga berbeda.

- c. Penelitian yang dilakukan oleh Wiku Kalis, lulusan Akademi Kepolisian tahun 2018 dengan judul “Optimalisasi Penggalangan Intelejen dalam Mencegah Tawuran Antar Pelajar SMA di Polresta Bogor Kota”. Maksud dari penelitian tersebut adalah bagaimana cara mengoptimalkan penggalangan intelejen untuk mencegah tawuran yang terjadi pada pelajar SMA di wilayah hukum Polresta Bogor Kota. Persamaan antara penelitian yang dilakukan Wiku Kalis dengan penulis adalah fokus penelitiannya terhadap penggalangan intelejen. Metode penelitian yang digunakan oleh kedua penulis adalah metode penelitian kualitatif berdasarkan pengamatan langsung di lapangan. Sementara itu, perbedaan penelitian antara Wiku Kalis dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu pada fokus penelitiannya. Penelitian Wiku Kalis fokus pada penggalangan intelejen dalam mencegah tawuran pelajar SMA, sedangkan penelitian penulis fokus pada penggalangan intelejen dalam mendukung keamanan terselenggaranya Pilkadaes. Selain itu, lokasi penelitian antara kedua penulis juga berbeda. Penelitian M. Ari Nuzul dilaksanakan di wilayah Polres Purwakarta yang masuk dalam jajaran Polda Jawa Barat, sedangkan penelitian penulis jajaran Polda Jawa Tengah.

Tabel 2.1
Rangkuman Perbandingan Kepustakaan Penelitian

NO	Penulis/Judul	Hasil	Persamaan	Perbedaan	Kebaruan
1	2	3	4	5	6

1.	Deriel Ramadhan (2019), Peran Sat Intelkam dalam Pelaksanaan	Pelaksanaan penggalangan memiliki peran yang sangat penting dalam mencegah	1. Pendekatan Kualitatif. 2. Menjadikan penggalangan intelejen	1. Waktu penelitian. 2. Fokus penelitian kepada pemilu 2019.	Penelitian yang dilakukan penulis yaitu fokus pada permasalahan penggalangan
----	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6
	Penggalangan Intelijen guna Mencegah Pelanggaran Pemilu Presiden 2019 Di Kabupaten Magelang.	pelanggaran pemilu 2019	sebagai fokus permasalahan dari penelitian yang dilakukan. 3. Lokasi berbeda		Unit Politik terkait rangkaian kegiatan Pilkaes.
2.	M. Ari Nuzul (2018) Peran Satuan Intelkam dalam Melaksanakan Penggalangan Intelijen guna Mencegah Radikalisme di Polres Purwakarta.	Peran Satuan Intelkam melalui penggalangan untuk mencegah Radikalisme.	1. Pendekatan Kualitatif 2. Menjadikan penggalangan intelejen sebagai fokus permasalahan dari penelitian yang dilakukan.	1. Waktu Penelitian. 2. Tempat Penelitian 3. Fokus Penelitian penggalangan untuk mencegah Radikalisme.	Penelitian dilakukan fokus pada Unit Politik Satintelkam Polres Magelang
3.	Wiku Kalis (2018) Optimalisasi Penggalangan Intelijen dalam Mencegah Tawuran Antar Pelajar SMA di Polresta Bogor Kota.	Penggalangan Intelijen yang dilakukan Polresta Bogor Kota dalam mencegah tawuran pelajar SMA masih belum optimal.	1. Pendekatan Kualitatif 2. Menjadikan penggalangan intelejen sebagai fokus permasalahan dari penelitian yang dilakukan.	1. Waktu Penelitian. 2. Tempat Penelitian 3. Fokus Penelitian penggalangan untuk mencegah tawuran antar pelajar.	Penggalangan yang dilakukan penulis yaitu terkait Pilkaes

Sumber: Penelitian terdahulu, data diolah oleh penulis

2.2 Kepustakaan Konseptual

Kepustakaan konseptual merupakan pembahasan teori dan konsep yang berasal dari ilmu pengetahuan maupun penemuan terdahulu serta memiliki keterkaitan hubungan dengan permasalahan dalam penelitian yang dilakukan. Penggunaan teori dan konsep ini sebagai pisau analisis dalam mengembangkan cara berpikir penulis saat menemukan permasalahan yang ada di lapangan. Dengan adanya teori dan konsep sebagai pisau analisis ini diharapkan penulis dapat menemukan solusi permasalahan yang efektif dan akuntabel.

Dalam penulisan penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teori dan konsep yang relevan dengan permasalahan yang diangkat. Berikut ini penjabaran dari teori dan konsep yang dipakai sebagai pisau analisis penulisan penelitian ini.

2.2.1 Konsep Intelejen

Intelejen berasal dari bahasa Inggris *Intelligence* (kata benda), yang secara umum intelejen memiliki arti kecerdasan. Sedangkan secara khusus intelejen yaitu kegiatan yang berkaitan dengan pengamanan negara dan bangsa. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 Pasal 1 ayat (1) pengertian intelejen yaitu:

Intelijen adalah pengetahuan, organisasi, dan kegiatan yang terkait dengan perumusan kebijakan, strategi nasional, dan pengambilan keputusan berdasarkan analisis dari informasi dan fakta yang terkumpul melalui metode kerja untuk pendeteksian dan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan setiap ancaman terhadap keamanan nasional.

Kepolisian Negara Republik Indonesia membutuhkan kemampuan intelejen yang baik dalam melakukan *early detection* dan *early warning* untuk menjaga keamanan nasional. Hal ini menjadi penting karena perkembangan teknologi yang makin cepat membuat kondisi masyarakat menjadi dinamis dan mendukung perkembangan motif baru tindak pidana. Selain itu, mudahnya masyarakat dalam menerima akses informasi melalui internet menimbulkan banyak isu negative yang membuat situasi

Kamtibmas menjadi tak terkendali. Menurut (Harefa, Herius, Fitriati dan Ferdi, 2018) Kegiatan operasional Intelkam dibagi menjadi 3 kegiatan yang berlaku secara universal yaitu penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan. Ketiga kegiatan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh informasi, pengamanan objek/aktivitas, dan menciptakan kondisi Kamtibmas yang kondusif dan mempermudah pelaksanaan tugas Polri. Alasan penggunaan konsep intelejen dalam penelitian ini karena relevan dan ideal dengan pelaksanaan tugas Satintelkam. Salah satu yaitu menciptakan kondisi Kamtibmas kondusif yang mendukung pelaksanaan tugas Polri. Berhubungan dengan penelitian ini yang menjadikan penggalangan Unit Politik Satintelkam dalam rangka kegiatan Pilkades sebagai objek penelitian, makaperlu adanya penggalangan untuk menjamin keamanan terselenggaranya Pilkades di wilayah hukum Polresta Magelang.

2.2.2 Konsep Penggalangan Intelejen Satintelkam

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Intelejen dan Keamanan (Perkabik) No. 3 Tahun 2013 tentang Penggalangan Intelejen Polri Pasal 1 ayat (6) yang menyatakan bahwa:

Penggalangan Intelejen adalah semua usaha, pekerjaan, dan kegiatan yang dilakukan secara berencana, terarah oleh sarana intelejen untuk membuat, menciptakan, mengubah suatu kondisi dalam masyarakat sehingga mencapai keadaan yang menguntungkan terhadap pelaksanaan tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Penggalangan intelejen sangat berkaitan dengan kegiatan Saintelkam lainnya yaitu kegiatan penyelidikan intelejen maupun pengamanan intelejen. Penyelidikan dilakukan sebagai upaya pengumpulan bahan keterangan yang kemudian dianalisis dan digunakan untuk mendukung pelaksanaan penggalangan terhadap sasaran yang ditentukan. Tujuan pelaksanaan penggalangan intelejen yaitu mempengaruhi seseorang untuk menciptakan kondisi yang mendukung pelaksanaan tugas Polri dalam rangka memelihara Kamtibmas. Dalam

mencapai tujuan tersebut, dijelaskan pada pasal 4 Perkabik No. 3 Tahun 2013, penggalangan intelegen menggunakan prinsip-prinsip penggalangan intelegen sebagai berikut:

- a. Kerahasiaan, penggalangan dilakukan secara tertutup.
- b. Ketelitian, penggalangan dilakukan secara cermat dan saksama.
- c. Kedisiplinan, penggalangan dilandasi kesadaran terhadap peraturan.
- d. Keamanan, penggalangan dilakukan secara berhati-hati.
- e. Keberanian, penggalangan dilakukan dengan percaya diri.
- f. Mengutamakan sumber informasi primer secara langsung dan hindari informasi sekunder.

2.2.3 Teori Manajemen

Dalam mendeskripsikan secara faktual dan komprehensif bagaimana kinerja penggalangan Satintelkam Unit Politik guna mendukung keamanan terselenggaranya Pilkades, teori manajemen sangat relevan untuk menjabarkan permasalahan yang ada. Suatu organisasi pasti memiliki sistem manajerial dalam pelaksanaan tugasnya sehingga perlu adanya pemahaman yang baik terhadap teori manajemen untuk mencapai tujuan yang ideal. Terdapat tiga alasan pentingnya teori manajemen digunakan untuk mencapai tujuan menurut George R. Terry (2009) yaitu:

- a. Manajemen sangat diperlukan dalam mencapai tujuan pribadi, kelompok, maupun organisasi.
- b. Manajemen dibutuhkan untuk menjaga tujuan, kegiatan, dan sasaran dari pihak yang memiliki kepentingan baik secara pribadi, kelompok, maupun organisasi yang saling bertentangan.
- c. Manajemen digunakan untuk mengukur efektif dan efisiensi suatu pekerjaan yang dilaksanakan dalam organisasi.

Menurut George R. Terry dalam buku "Prinsip-Prinsip Manajemen" menjelaskan bahwa dalam proses manajemen, penting untuk memahami *planning*, *organizing*, *actuating*, dan *controlling*. Keempat proses ini sering disebut dengan POAC yang merupakan alat manajerial dalam

melaksanakan dan mengatur suatu kegiatan demi terwujudnya tujuan yang disepakati Bersama. Berikut adalah pengertian POAC menurut George R. Terry:

a. *Planning* (Perencanaan)

Perencanaan merupakan proses manajemen dengan menentukan langkah awal yang akan diambil untuk melakukan suatu pekerjaan sehingga apa yang dilakukan memiliki arah tujuan yang jelas. Dalam proses perencanaan ini, seorang pemimpin menentukan tindakan-tindakan apa yang akan dilakukan oleh suatu organisasi dan memberikan langkah cadangan atau alternatif apabila terdapat perbedaan situasi kondisi di lapangan. Maka dari itu, kemampuan dan keterampilan seorang pemimpin dalam melakukan suatu perencanaan sangat menentukan keberhasilan kinerja suatu organisasi.

b. *Organizing* (Pengorganisasian)

Pengorganisasian merupakan proses yang dilakukan dengan cara membagi kerja ke bagian yang lebih kecil sesuai dengan kompetensi dan kemampuannya. Koordinasi yang dilakukan memperhatikan sumber daya serta sarana prasarana untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi suatu pekerjaan yang dilakukan sehingga dapat mencapai tujuan organisasi yang telah direncanakan sebelumnya.

c. *Actuating* (Pelaksanaan)

Pelaksanaan merupakan proses penerapan dari hasil perencanaan dan pengorganisasian dengan menggerakkan anggota agar memiliki dorongan motivasi untuk mencapai tujuan yang ditentukan. Istilah penggerak biasa dikenal sebagai inisiator atau penentu langkah pertama. Pemimpin harus mampu membuat langkah pertama dan memberikan instruksi kepada anggota sehingga anggota mampu melaksanakan tugas dengan baik.

d. *Controlling* (Pengawasan)

Pengawasan merupakan suatu kegiatan untuk mengendalikan seluruh kegiatan yang dilaksanakan agar sesuai perencanaan, pengorganisasian, dan dalam pelaksanaannya berjalan dengan baik. Proses pengawasan ini dilakukan untuk meminimalisir adanya kesalahan dalam pelaksanaan tugas.

Pemimpin harus mahir dan cakap dalam menerapkan teori manajemen dalam menjalankan tugas di lapangan sehingga terbentuk sistem organisasi yang sehat. Menurut George R. Terry terdapat 6 unsur pokok dalam manajemen, antara lain:

a. *Man* (Manusia)

Dalam proses manajemen, manusia menjadi faktor utama dalam menentukan keberhasilan suatu tugas. Hal ini dikarenakan unsur manusia memiliki peranan langsung dalam melakukan proses dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, hingga pengawasan. Sehingga apabila tidak ada unsur manusia, maka semua prosesnya tidak dapat dilakukan.

b. *Money* (Uang)

Uang menjadi faktor penting karena setiap pelaksanaan tugas oleh suatu organisasi membutuhkan anggaran untuk memenuhi segala kebutuhan yang diperlukan. Contohnya, personel melaksanakan tugas operasional dengan adanya anggaran pelaksanaan tugas untuk mencapai tujuan.

c. *Material* (Bahan)

Bahan yang dimaksud adalah berupa prasarana dalam melaksanakan tugas. Dalam menjalankan manajerial organisasi, prasarana merupakan alat dan perlengkapan yang diperlukan dalam mendukung kinerja anggota sehingga dapat meraih tujuan secara efektif dan efisien.

d. *Machine* (Mesin)

Mesin yang dimaksud adalah sarana yang digunakan untuk mencapai tujuan. Sarana merupakan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasi. Sedangkan prasarana yaitu segala sesuatu yang mendukung sarana yang digunakan.

e. *Method* (Metode)

Metode merupakan cara-cara atau prosedur yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasi. Sebagai seorang pemimpin harus mampu menentukan strategi dan cara yang harus dilakukan agar tugas dapat terlaksana dengan baik sesuai tujuan yang ditentukan.

f. *Market* (Pasar)

Dalam ilmu manajemen, pasar sangat menentukan kebijakan ataupun keputusan yang akan diambil oleh pemimpin. Sebagai seorang pemimpin, kecermatan mengamati situasi kondisi lapangan sangat berpengaruh terhadap kebijakan apa yang diambil agar organisasi dapat berjalan dengan baik.

2.2.4 Teori SWOT

Menurut Robinson dan Pearce (1997) analisis SWOT merupakan komponen penting dalam strategi manajemen dimana mencakup faktor internal dan eksternal. Faktor internal akan menghasilkan profil organisasi serta mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dan organisasi. Selanjutnya, kekuatan dan kelemahan akan dibandingkan dengan faktor eksternal berupa peluang dan ancaman bagi sebuah organisasi. Analisis SWOT ini bertujuan agar pemimpin mampu menentukan opsi keputusan yang akan dibuat serta memiliki strategi alternatif dalam menghadapi permasalahan yang ada. Berikut akan dijelaskan masing-masing komponen teori SWOT.

a. *Strength* (Kekuatan)

Kekuatan merupakan segala sesuatu yang menjadi kelebihan maupun keunggulan baik itu dalam hal sumber daya, kompetensi, maupun sarana prasarana dari suatu organisasi. Kekuatan yang

diidentifikasi merupakan internal dari organisasi sehingga pemimpin dapat memahami apa kekuatan dan organisasinya dibandingkan dengan organisasi lain. Analisis kekuatan ini bertujuan agar suatu organisasi dapat menyadari kekuatan organisasinya dan terus ditingkatkan untuk memperbesar kemungkinan tercapainya tujuan organisasi.

b. *Weakness* (Kelemahan)

Kelemahan merupakan situasi maupun kondisi yang menjadi kekurangan yang dimiliki sebuah organisasi. Analisis kelemahan ini bersumber dari internal dari sebuah organisasi. Seorang pemimpin harus mampu mengidentifikasi kelemahan dari organisasinya dan harus memahami solusi permasalahan. Tujuan analisis kelemahan ini yaitu organisasi mampu mengklasifikasikan Magelanga baik ringan maupun serius terhadap kemajuan organisasi.

c. *Opportunity* (Peluang)

Peluang merupakan suatu kesempatan dari luar organisasi yang memberikan kontribusi terhadap berkembangnya suatu organisasi di masa depan. Sebagai pemimpin organisasi, kemampuan bersosialisasi sangat penting sehingga mampu membangun peluang di luar. Cara ini dapat memperbesar kemungkinan suatu organisasi mampu berkembang dengan potensi yang dimiliki ditambah adanya peluang sebagai katalis.

d. *Threat* (Ancaman)

Ancaman merupakan situasi dan kondisi yang harus dihadapi sebuah organisasi baik itu dari pihak lain maupun faktor lingkungan yang dapat menyebabkan kemunduran. Pemimpin memiliki peran yang besar untuk mengatasi ancaman tersebut sehingga tidak menjadi penghalang bagi perkembangan organisasi.

2.2.5 Teori Kompetensi

Menurut Lyle Spencer dan Signe Spencer (1993), kompetensi adalah karakter sikap dan perilaku, atau kemauan serta kemampuan individual yang relatif stabil. Ketika menghadapi situasi dan tempat kerja yang terbentuk dari sinergi antara watak, konsep diri, motivasi internal, serta kapasitas pengetahuan konseptual.

Kompetensi didefinisikan sebagai “*an underlying characteristics of an individual which is casually related to criterion-referenced effective and or superior performance in a job or situation*” (sebagai karakteristik yang mendasari seseorang dan berkaitan dengan efektivitas kinerja individu dalam pekerjaannya”. Berdasarkan definisi tersebut bahwa kata “*underlying characteristics*” memiliki makna bahwa kompetensi merupakan suatu kepribadian yang sangat mendalam dan melekat bagi seorang individu serta perilaku yang dapat diprediksi pada berbagai keadaan dan tugas pekerjaan. Kata “*casually related*” memiliki makna kompetensi merupakan sesuatu yang menyebabkan perilaku dan kinerja seseorang. (Spencer & Spencer, 1993). Menurut Lyle Spencer dan Signe Spencer (1993), kompetensi dibagi menjadi 5 (lima) karakteristik, yaitu:

a. Motif (*motives*)

Motif dalam kompetensi merupakan sesuatu yang secara terus-menerus dipikirkan seseorang secara konsisten sehingga menimbulkan orang tersebut bertindak. Motif menggerakkan, mengarahkan, dan memilih perilaku terhadap tindakan.

b. Sifat (*trait*)

Sifat dalam kompetensi memiliki arti watak yang membuat orang untuk berperilaku atau tindakan seseorang dalam merespon suatu hal dengan cara-cara tertentu sehingga menimbulkan perilaku yang layak diperlihatkan.

c. Konsep diri (*self-concept*)

Konsep diri dalam kompetensi merupakan suatu informasi yang ada pada individu. Sikap dan nilai dapat diukur melalui tes yang diajukan

kepada responden guna mengetahui nilai yang dimiliki seseorang dalam individunya.

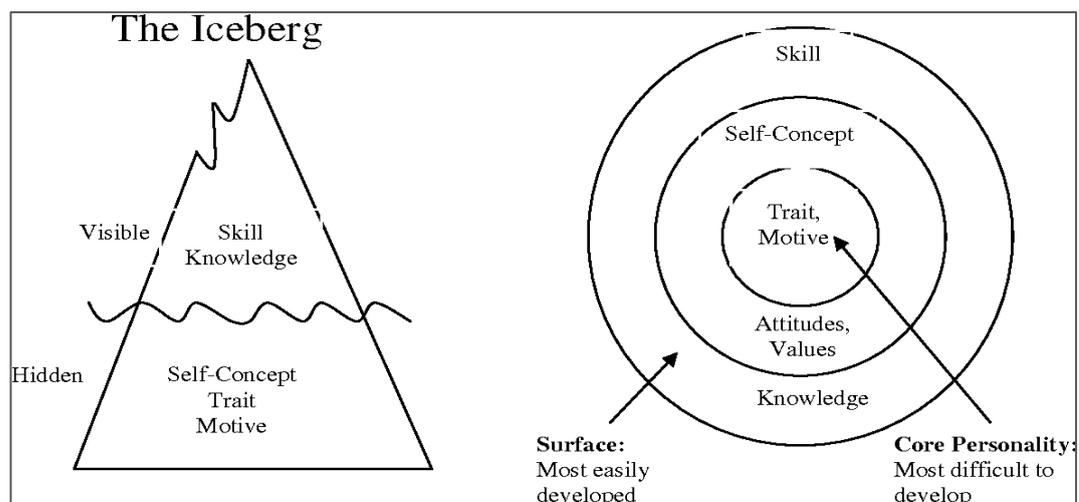
d. Pengetahuan (*knowledge*)

Pengetahuan dalam kompetensi merupakan suatu informasi dalam bidang tertentu. Nilai tes pengetahuan yang kerap gagal memprediksi kinerja karena hasil tes tersebut digunakan secara nyata dalam pekerjaan.

e. Keterampilan (*skill*)

Keterampilan dalam hal ini memiliki arti kemampuan untuk melaksanakan tugas fisik atau mental tertentu. Kompetensi keterampilan kognitif mencakup berpikir secara analitis dan berpikir secara konseptual.

Gambar 2.1
Central and Surface Competencies



Sumber: Spencer and Spencer, 1993:11

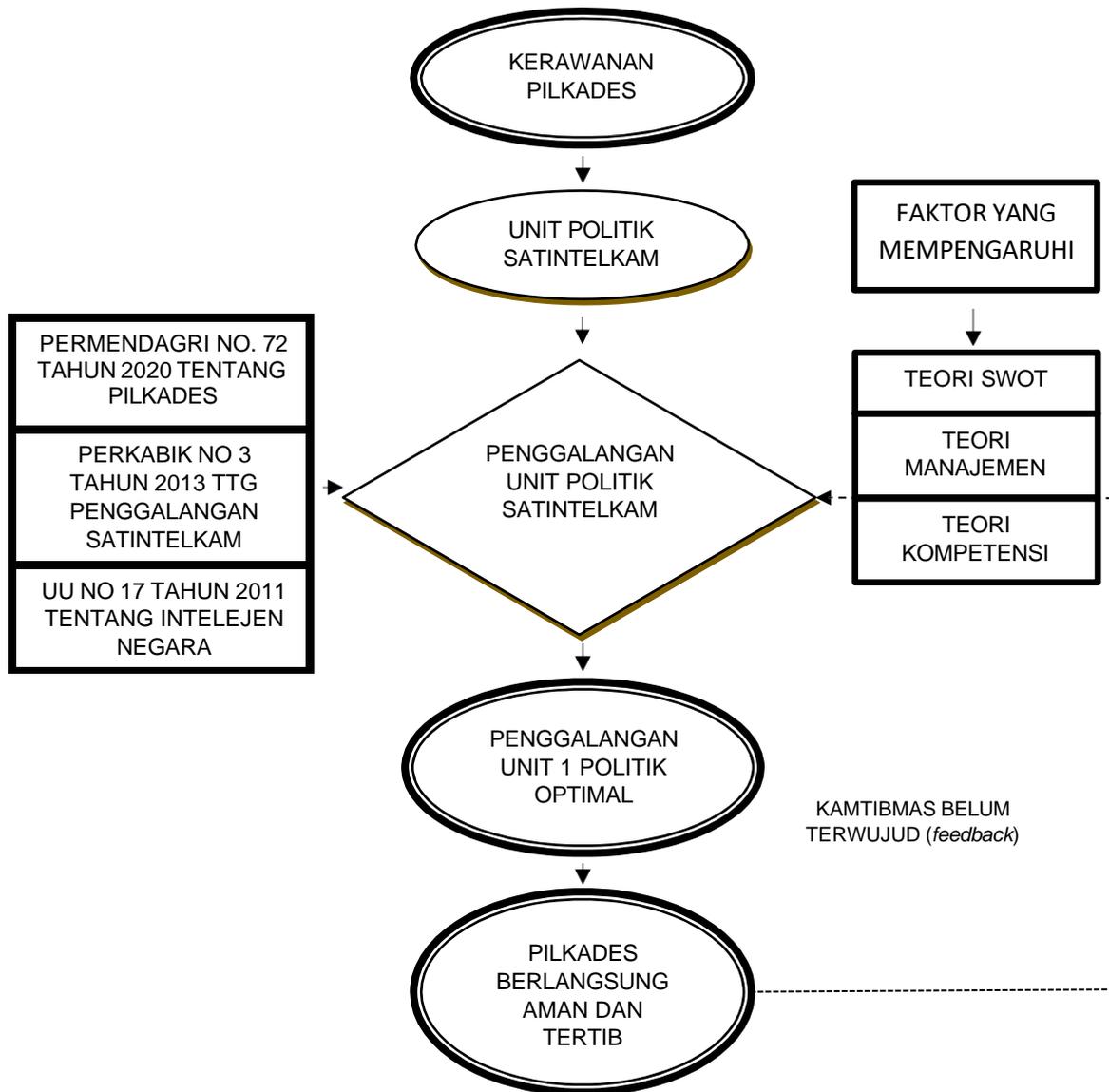
Berdasarkan gambar 2.1, menjelaskan bahwa kompetensi pengetahuan (*knowledge competencies*) dan keahlian skill (*skill competencies*) cenderung lebih nyata atau tampak dipermukaan sebagai salah satu karakteristik yang dimiliki manusia. Sedangkan, pada *self-concept*, *trait*, dan *motive* kompetensi lebih tidak tampak dan berada pada titik tengah kepribadian seseorang (Spencer, 1993). Dalam hal peran atau

jabatan, kompetensi relatif lebih penting dalam memprediksikan kinerja superior dari pada keterampilan yang berkaitan dengan tugas, intelegensia atau *credential*. Sementara untuk jabatan teknis, profesional, dan manajerial, diperlukan motivasi, keterampilan interpersonal, keterampilan politik dan lainnya adalah kompetensi.

2.3 Kerangka Berpikir

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang dan rumusan masalah, yang menjadi perhatian inti permasalahan yaitu terjadinya konflik dalam pelaksanaan Pilkades pada tahun 2016 dan 2019 di wilayah hukum Polres Magelang. Unit Politik Satintelkam Polres Magelang melakukan upaya preventif dalam menyambut Pilkades dengan melaksanakan penggalangan intelegen berdasarkan Perkabik Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penggalangan Intelegen Polri. Selain itu, Unit Politik Satintelkam Polres Magelang juga memedomani Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa sebagai acuan dalam keterlibatan Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban pelaksanaan Pilkades. Penelitian ini membahas tentang penggalangan Unit Politik Satintelkam Polres Magelang sebagai upaya *preemptif* menghadapi Pilkades sehingga dapat mewujudkan pesta demokrasi yang aman dan tertib. Berikut merupakan kerangka berpikir penelitian ini:

Gambar 2.2
Kerangka Berpikir



Adanya kerawanan pada kegiatan Pilkada menjadi tugas dari Unit Politik Satintelkam untuk melakukan upaya pre-emptif yaitu penggalangan intelejen sehingga dapat menciptakan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat. Pelaksanaan penggalangan yang optimal diharapkan mampu menciptakan pelaksanaan Pilkada yang aman dan tertib.

BAB III

KONDISI FAKTUAL

3.1 Kondisi Awal

3.1.1 Deskripsi Pelaksanaan Pilkades Tahun 2022 di Wilayah Hukum Polres Magelang

Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) merupakan pesta rakyat di dalam lingkup pemerintahan desa untuk memilih Kepala Desa yang akan memimpin selama 6 tahun kedepan. Permasalahan yang dibahas oleh penulis yaitu penggalangan Unit Politik Satintelkam guna mewujudkan keamanan dan ketertiban Pemilihan Kepala Desa tahun 2022 di wilayah hukum Polres Magelang. Oleh karena itu, penulis memberikan deskripsi terkait pelaksanaan Pilkades tahun 2022 di wilayah hukum Polres Magelang. Berikut merupakan beberapa deskripsi yang didapatkan penulis terkait pelaksanaan Pilkades tahun 2022.

3.1.1.1 Dasar hukum pelaksanaan Pilkades serentak tahun 2022

Pemilihan Kepala Desa merupakan suatu pesta rakyat yang dilaksanakan di wilayah desa untuk memilih pemimpin pada desa tersebut dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (LUBERJURDIL). Dalam pelaksanaan Pilkades, terdapat berbagai peraturan baik secara nasional maupun masing-masing daerah yang perlu dipedomani sebagai berikut:

- 1) UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa.
- 2) Permendagri No. 72 Th 2020 tentang Pilkades.
- 3) Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022 Nomor 21).

3.1.1.2 Tahapan Pelaksanaan Pilkades 2022 Kabupaten Magelang
Pilkades di wilayah hukum Polres Magelang pada tahun 2022 ini dilaksanakan oleh 23 desa yang berada pada 14 wilayah kecamatan. Tahapan pelaksanaan Pilkades ini dimulai dari tahap persiapan, penetapan bakal calon, kampanye, pemungutan suara, penghitungan suara, dan pelantikan Kepala Desa terpilih. Rangkaian pelaksanaan Pilkades di Kabupaten Magelang dijelaskan berdasarkan dalam tabel 3.2 sebagai berikut:

Tabel 3.2
Tahapan Pelaksanaan Pilkades 2022

NO	KEGIATAN	WAKTU	
		NORMAL	PERPANJANGAN
1	2	3	4
	Sosialisasi Tahapan Pilkades	24 - 25 Mei 2022	
	Pemberitahuan BPD kepada Pilkades tentang akhir masa jabatan	30 Mei 2022	
PERSIAPAN			
1.	Pembentukan Panitia Pemilihan Desa	14 Juni 2022	
2.	Pengiriman Keputusan BPD tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Desa	15 - 17 Juni 2022	
3.	Rapat Pleno Panitia Pemilihan Desa membahas tentang:		
	A. Pembagian Tugas Panitia	4 - 8 Juli 2022	
	B. Pembentukan petugas pendaftaran pemilih, KPPS, dan petugas keamanan	11 – 15 Juli 2022	
	C. Penyusunan rencana biaya pemilihan	19 – 25 Juli 2022	
	D. Pengajuan perencanaan biaya pemilihan	26 Juli 2022	
4.	pembekalan bagi Penyelenggara Pilkades	19 – 21 Juli 2022	
1	2	3	4

5.	Persetujuan biaya pemilihan oleh Bupati	7 September 2022	
PENCALONAN			
1	Penetapan daftar pemilih		
	A. Pendaftaran Pemilih Per Dusun	25 - 31 Agustus 2022	
	B. Penyusunan Daftar Pemilih Sementara	1 - 4 September 2022	
	C. Pengumuman DPS kepada masyarakat	5 - 7 September 2022	
	D. Usul perbaikan dan informasi pemilih dalam DPS	5 - 7 September 2022	
	E. Penyusunan DPS Hasil Perbaikan	6 - 10 September 2022	
	F. Penyusunan DPTb	6 - 10 September 2022	
	G. Pengumuman DPTb	11 - 13 September 2022	
	H. Penyusunan DPT	14 - 18 September 2022	
	I. Penetapan DPT oleh Panitia Pemilihan Desa	19 September 2022	
	J. Pengumuman DPT kepada masyarakat	19 - 21 September 2022	
2.	Penjaringan		
	A. Pengumuman pendaftaran bakal calon oleh Panitia Pemilihan Desa	25 Agustus – 6 September 2022	
	B. Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa	25 Agustus – 6 September 2022	22 September – 11 Oktober 2022
	C. Penetapan nama bakal calon Kades yang berhak mengikuti penyaringan	7 September 2022	12 Oktober 2022
1	2	3	4

3.	Penyaringan		
	A. Penelitian berkas pencalonan bakal calon oleh Panitia Pemilihan Desa	8 - 16 September 2022	13 - 17 Oktober 2022
	B. Klarifikasi persyaratan administrasi	12 - 20 September 2022	13 - 17 Oktober 2022
	C. Pengumuman hasil penelitian persyaratan administrasi balon kades	21 September 2022	18 Oktober 2022
	D. Pelaksanaan seleksi tertulis apabila calon yang memenuhi syarat	22 - 27 September 2022	19 - 21 Oktober 2022
	E. Penetapan Calon kades yang berhak dipilih dan penentuan nomor urut	28 September 2022	24 Oktober 2022
	F. Pengumuman calon Kepala Desa	29 September - 5 Oktober 2022	25 - 27 Oktober 2022
4.	Sosialisasi tata cara pemungutan suara dan calon kepala desa	6 Oktober - 3 Nopember 2022	25 Oktober - 3 Nopember 2022
5.	Pelaksanaan Kampanye	4 Nopember 2022	
6.	Masa Tenang	5 Nopember 2022	
PEMUNGUTAN SUARA			
1.	Persiapan pemungutan suara		
	A. Pengumuman pelaksanaan Pemungutan suara oleh Panitia Pemilihan Desa	25 - 30 Oktober 2022	
	B. Penyampaian Undangan Pemberitahuan Pemungutan Suara oleh Panitia Pemilihan Desa	31 Oktober - 3 Nopember 2022	
2.	Pelaksanaan pemungutan suara	6 Nopember 2022	
1	2	3	4

	Pemungutan suara yang ditunda	9 Nopember 2022
	Rekapitulasi perolehan suara jika TPS > 1	6 - 7 Nopember 2022
	Penyelesaian perselisihan	8 – 29 Nopember 2022
3.	A. Penetapan calon terpilih	
	<ul style="list-style-type: none"> • Penyampaian Laporan hasil pemungutan suara 	7 – 9 Nopember 2022
	<ul style="list-style-type: none"> • Penyampaian Laporan hasil pemungutan suara oleh Panitia Pilkades kepada BUpati 	14 - 16 Nopember 2022
	<ul style="list-style-type: none"> • Penyampaian Laporan Calon Kepala Desa Terpilih oleh BPD kepada Bupati ditembuskan Camat. 	10 – 11 Nopember 2022
	<ul style="list-style-type: none"> • Penyampaian Laporan Calon Kepala Desa Terpilih oleh BPD untuk pemungutan suara yang ditunda. 	17 - 18 Nopember 2022
	B. Pengesahan dan Pelantikan	
	<ul style="list-style-type: none"> • Pengesahan dan Pengangkatan Calon kades Terpilih menjadi Kepala Desa 	14 – 25 Nopember 2022
	<ul style="list-style-type: none"> • Pengesahan dan Pengangkatan Calon kades Terpilih 	21 – 25 Nopember 2022
	<ul style="list-style-type: none"> • Pelantikan dan Pengambilan sumpah/janji oleh Bupati 	7 Desember 2022

Sumber: Dispermades Kabupaten Magelang

3.1.1.3 Kerawanan pada pelaksanaan Pilkades 2022 di Kabupaten Magelang

Pilkades merupakan kegiatan pesta demokrasi yang memiliki kerawanan yang tinggi karena calon Kepala Desa bersentuhan langsung dan memiliki hubungan yang dekat dengan masyarakat. Pada pelaksanaan Pilkades tahun 2022, berbagai kerawanan muncul pada masing-masing per kecamatan yang disusun pada data sebagai berikut.

a. Desa Banaran, Kecamatan Grabag

Berdasarkan Laporan Informasi Pilkades tahun 2016, Desa Banaran mengalami permasalahan pada tahap pemilihan suara dikarenakan adanya warga yang sah secara administrasi menjadi pemilih, namun tidak masuk dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap). Tidak masuknya 1 orang warga yang tidak masuk dalam DPT ini diketahui saat berlangsungnya pemungutan suara sehingga menimbulkan kecurigaan dan gejolak masyarakat berupa protes kepada Panitia Desa.

b. Desan Sengi, Kecamatan Dukun

Berdasarkan Laporan Informasi Pilkades tahun 2016, Desa Sengi mengalami kericuhan yang cukup besar karena menimbulkan aksi demonstrasi dari salah satu calon terhadap Panitia Penyelenggara Pilkades. Pemicu permasalahan ini diawali dengan adanya salah satu calon yaitu Sdr. Sureni Risyanto yang tidak lolos syarat administrasi, namun Sdr. Sureni Risyanto tidak menerima keputusan Panitia Desa dikarenakan tidak adanya sosialisasi Panitia Desa terkait syarat administrasi. Kemudian pada tanggal 10 dan 15 September 2016 tim sukses dan massa pendukung Sdr. Sureni Risyanto mendatangi Balai Desa Sengi melakukan demonstrasi dan meminta Panitia Desa untuk meloloskan Sdr. Sureni Risyanto. Akan tetapi, Panitia Desa menolak dan terjadi demo ricuh yang kemudian diamankan oleh Satuan Samaapta Polres Magelang.

c. Desa Blondo, Kecamatan Mungkid

Berdasarkan Laporan Informasi Pilkades 2019, Desa Blondo mengalami permasalahan dalam penyelenggaraan Pilkades pada tahun 2019. Permasalahan ini terjadi dikarenakan adanya interupsi (Sdr. Haryono) yang mempermasalahkan kelulusan Sdr. Suharto Udi di tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP). Namun, pembuktian dengan Surat Keterangan dari Kepala SMP Kanisius Santo Yusup Mertoyudan yang mendasarkan kesaksian dari mantan guru dan mantan rekan sekolahnya Suharto Udi yang menyatakan bahwa Sdr. Suharto Udi benar-benar sekolah di SMP tersebut dan lulus Tahun 1969. Pihak Sdr. Suharto Udi melalui kuasa hukumnya pada tanggal 12 November 2019 telah melayangkan somasi kepada Ketua Badan Permusyawaratan Desa Blondo yang intinya agar memerintahkan kepada Panitia Desa untuk melaksanakan Pilkades sesuai Surat Sekda. Akan tetapi, Panitia Pilkades dalam hal ini tetap bersikeras bahwa Suharto Udi tidak memenuhi syarat administrasi sehingga dengan ketidakjelasan ini, maka Pilkades akan diundur dan dilaksanakan pada tahun 2022.

d. Desa Sucen, Kecamatan Salam

Melalui wawancara yang dilakukan penulis dengan Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Sucen yang mengatakan bahwa:

Ketika melaksanakan pemungutan suara pada tanggal 6 November 2022, terjadi luapan kesenangan masyarakat Desa Sucen yang merayakan kemenangan Muhammad Husni Tamrin. Luapan kesenangan pendukung calon terpilih dilakukan melalui aksi konvoi yang menimbulkan gangguan Kamtibmas. Aksi konvoi ini juga membuat pendukung calon lainnya menyoraki sehingga timbul aksi cekcok antar pendukung. (Ketua Panitia Pilkades Desa Sucen, 2022)

Aksi ini menunjukkan bahwa penggalangan yang dilakukan oleh Unit Politik tidak optimal karena sesuai dengan Peraturan Bupati No. 45 Tahun 2022 tidak diperkenankan melakukan kegiatan konvoi karena dalam kondisi yang harus menjaga protokol kesehatan.

e. Desa Banyurojo, Kecamatan Mertoyudan

Hasil wawancara penulis ketika melakukan penggalangan bersama Unit Politik Satintelkam Polres Magelang terhadap sekretaris desa Banyurojo yang menyatakan bahwa:

Kerawanan di Desa Banyurojo ini dikarenakan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) paling banyak di Kabupaten Magelang dalam Pilkades tahun 2022 yaitu sejumlah 7.687 jiwa. Kondisi ini membuat pengendalian masyarakat harus lebih ekstra sehingga kami membutuhkan bantuan dari rekan Polri. (Sekretaris Desa Banyurojo, 2022)

Walaupun tidak terdapat catatan kejadian menonjol pada Pilkades tahun 2016 tetapi jumlah DPT yang banyak pada Desa Banyurojo ini perlu menjadi perhatian Unit Politik Satintelkam agar situasi dan kondisi dari seluruh rangkaian Pilkades di Desa Banyurojo tetap kondusif.

3.1.2 Kondisi Awal Sumber Daya Organisasi Unit Politik Satintelkam Polres Magelang

Pada kondisi awal sumber daya organisasi yang ada pada kegiatan penggalangan Unit Politik Satintelkam Polres Magelang, peneliti menggunakan teori fungsi manajemen yang dikemukakan oleh George R. Terry (2013) untuk mengidentifikasi Sumber Daya Organisasi yang dimiliki. Alat sarana manajemen yang dilakukan antara lain *man*, *money*, *material*, dan *method*. Berikut penjelasan terkait alat sarana pendukung manajemen yang dimiliki oleh Unit Politik Satintelkam Polres Magelang.

3.1.2.1 Sumber Daya Manusia (*Man*)

Sumber Daya Manusia memegang peranan utama dalam suatu organisasi karena berperan langsung dalam kegiatan operasional Polri. Oleh karena itu, sangat penting memiliki sumber daya manusia yang berkualitas dan profesional dalam pelaksanaan tugas untuk mencapai tujuan organisasi. Untuk itu, sangat penting untuk mengelola sumber daya manusia dengan memperhatikan segi kualitas dan kuantitas anggota.

a. Kuantitas

Unit Politik Satintelkam Polres Magelang memiliki jumlah anggota sebanyak 7 orang yang dipimpin oleh seorang Kepala Unit (Kanit) Politik Satintelkam berpangkat Ajun Inspektur Polisi Dua (AIPDA). Pada saat pelaksanaan penelitian, jabatan Kanit Politik Satintelkam Polres Magelang yaitu AIPDA Tri Laksana Sumaedi, S.Pd. Berikut ini sajian data personel Unit Politik Satintelkam Polres Magelang periode Oktober 2022 pada tabel 3.4:

Tabel 3.4

Personel Unit Politik Satintelkam Per Oktober 2022

NO	NAMA	PANGKAT	NRP	JABATAN
1	2	3	4	5
	SUPRIJANTO, S.H.	AKP	72070082	KASATINTELKAM
1.	TRI LAKSANA SUMAEDI, S.Pd.	AIPTU	72070072	KANIT 1 POLITIK
2.	HERI WIJAYANTO, S.H.	BRIPKA	85090784	BANIT
3.	SETIADI PRASETYO	BRIPKA	86060371	BANIT
4.	YOGA PINANDITA SUHARSONO	BRIGPOL	88100982	BANIT
5.	PASKIBRAKA PUTRA GINANJAR.A, S.H.	BRIGPOL	91080035	BANIT
6.	WISNU PRABOWO, S.H.	BRIGPOL	92090048	BANIT
7.	RHIZAL SEPTIAN HARYONO, S.H.	BRIGPOL	93090733	BANIT

Sumber: Satintelkam Polres Magelang 2022

b. Kualitas

Hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala Unit Politik terkait kualitas dari anggota Unit Politik yang dilihat dari Dikbangspes masih

belum sesuai harapan, seperti yang dikatakan Kepala Unit Politik Satintelkam Polres Magelang bahwa:

Dari segi kualitas, anggota kami belum terpenuhi dengan baik karena merasa bahwa Dikbangspes menyita waktu kerja. Begitu pun saya juga masih belum Dikbangspes karena waktu yang sempit. Saya juga merasa bahwa sulit untuk mendapatkan izin melaksanakan Dikbangspes. (Kepala Unit Politik Satintelkam, 2022)

Dari hasil wawancara diatas, menunjukkan bahwa kualitas anggota Unit Politik Satintelkam Polres Magelang masih belum sesuai dengan apa yang diharapkan. Belum ada spesifikasi kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing personel, bahkan seorang Kanit pun belum melaksanakan Dikbangspes. Selain itu, berdasarkan observasi yang dilakukan oleh penulis ketika melaksanakan penggalangan di desa, tidak semua anggota memiliki kecakapan dalam berbicara secara persuasif. Hal ini dikuatkan dengan pernyataan Bripka Setiadi bahwa:

Memang benar tidak semua anggota bisa berbicara luwes seperti saya ketika melaksanakan penggalangan yang berhadapan dengan masyarakat. Pada anggota Unit Politik yang baru juga banyak yang perlu belajar bagaimana berbicara dengan luwes dan santai, tetapi tujuan dari penggalangan tetap tercapai.

Hal ini menunjukan bahwa belum semua anggota Unit Politik Satintelkam Polres Magelang berkompeten dan cakap dalam melakukan komunikasi yang persuasif pada kegiatan penggalangan yang dilaksanakan untuk menciptakan kondisi yang kondusif yaitu keamanan dan ketertiban rangkaiankegiatan Pilkades.

3.1.2.2 Anggaran (*Money*)

Fungsi deteksi dini Satintelkam dibagi menjadi 3 kegiatan utama yaitu penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan. Kegiatan

penggalangan Unit Politik Satintelkam tersebut akan berlangsung dengan baik apabila terdapat dukungan anggaran yang memenuhi kebutuhan operasional. Rencana Distribusi Satintelkam Polres Magelang tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 3.5
DIPA Unit Politik Satintelkam Polres Magelang 2022

No	Bidang	Kegiatan	dukgar
1	2	3	4
1	Modern Sarpras		Rp. 730.000
2	Harkamtibmas		Rp. 920.370.000
	Analisis	Pembinaan intelejen	Rp. 39.760.000
		1) Telaahan mingguan	Rp. 20.800.000
		2) Telaahan bulanan	Rp. 10.560.000
		3) Pulbaket/sumber terbuka	Rp. 3.360.000
		4) Laporan Harian Khusus	Rp. 2.220.000
		5) Perkiraan Cepat	Rp. 2.820.000
	Politik		Rp. 216.015.000
		1) Deteksi	Rp. 4.095.000
		2) Lidik taktis	Rp. 2.800.000
		3) Pembentukan jaringan	Rp. 14.000.000
		4) Pembinaan jaringan	Rp. 16.320.000
		5) Pengamanan intelijen	Rp. 2.800.000
	8 Kegiatan	6) Penggalangan intelijen perorangan	Rp. 176.000.000
	Ekonomi		Rp. 188.455.000
		1) Deteksi	Rp. 2.695.000
		2) Lidik taktis	Rp. 700.000
		3) Pembentukan jaringan	Rp. 14.000.000
		4) Pembinaan jaringan	Rp. 16.360.000
		5) Pengamanan intelijen	Rp. 700.000
	8 Kegiatan	6) Penggalangan intelijen	Rp. 154.000.000
1	2	3	4
	Sosbud		Rp. 188.455.000
		1) Deteksi	Rp. 3.065.000
		2) Lidik taktis	Rp. 700.000

		3) Pembentukan jaringan	Rp. 14.000.000
		4) Pembinaan jaringan	Rp. 16.360.000
		5) Pengamanan intelijen	Rp. 700.000
	8 Kegiatan	6) Penggalangan intelijen	Rp. 154.000.000
	Keamanan		Rp. 254.685.000
		1) Deteksi	Rp. 3.065.000
		2) Lidik taktis	Rp. 700.000
		3) Pembentukan jaringan	Rp. 14.000.000
		4) Pembinaan jaringan	Rp. 16.220.000
		5) Pengamanan intelijen	Rp. 700.000
	8 Kegiatan	6) Penggalangan intelijen	Rp. 220.000.000
Jumlah total anggaran			Rp. 921.100.000

Sumber: Rencana Distribusi Anggaran DIPA Satintelkam tahun 2022

Dari data tabel tersebut dimana penggalangan intelejen seharusnya dilaksanakan sebanyak 8 kali indeks kegiatan, namun pada kenyataan di lapangan kegiatan penggalangan dilaksanakan sebanyak 21 kali pada tahun 2022. Laporan anggaran dari setiap kegiatannya pun tidak dibuat sehingga wujud pertanggungjawabannya tidak jelas sesuai jumlah anggaran yang tersedia dalam DIPA Unit Politik Satintelkam.

3.1.2.3 Sarana dan Prasarana (*Materia*)

Sarana dan Prasarana pada seluruh Unit Satintelkam Polres Magelang tidak tersedia secara tersendiri, namun tergabung pada Satintelkam secara utuh. Sarana prasarana yang dimiliki Satintelkam Polres Magelang terdiri atas material atau peralatan yang mendukung pelaksanaan tugas operasional untuk menciptakan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat dalam kegiatan Pemilihan Kepala Desa di wilayah hukum Polres Magelang. Sarana dan prasarana yang diberikan untuk Unit Politik Satintelkam diklasifikasikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.6
Sarana dan Prasarana Satintelkam Polres Magelang

NO	JENIS BARANG	JUMLAH BARANG/	KONDISI BARANG
----	--------------	----------------	----------------

		UNIT	
1	2	3	4
1	Mobil Avanza type 1,5 G M/T Toyota warna hitam (Kendaraan operasional intel)	1 Unit	Baik
2	Laptop S 400/Getac, Termasuk: -Anti Virus/Kaspersky -Microsoft Office Home And Bussiness 2013 -Harddisk Eksternal Expansion Portable Usb 3.02 TB/SEAGATE	1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit	Baik Baik Baik Baik
3	Analyst Software And Notebook Terdiri Dari : -Analyst Software I2 standart/IBM -Notebook E560/LENOVO -Anti Virus/Kaspersky -Microsoft Office Home and Business 2013 -Harddisk Eksternal Expansion Portable USB 3.02 TB/SEAGATE	1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit	Baik Baik Baik Baik Baik
4	Covert Mini Digital A/V Recorder, terdiri dari : -Key Chain (gantungan Kunci) PV-RC200HD/Lawmate -Pen (Pulpen) EMC-004HD 8GM/Spy Cam -Topi(Hat) CameraDVR/OneTouch	5 Unit 6 Unit 5 Unit	Baik Baik Baik
5	Portable Cellular Jamer PJ012	1 Unit	Baik
1	2	3	4

6	Video streaming with 4 channel recorder and 480 GB solid state cartridge+licenses TVI IP450-HDV/Digital Barriera	1 Unit	Baik
7	Surveillance car digital camera set P1224-E/AXIS	1 Set	Baik
8	Covert body worn camera P1204/AXIS -Antenna bullet M2 titanium -Connector -POE Switch -Battery 12V -Backpack+Cooling system	1 Set 2 Unit 2 Unit 1 Unit	Baik Baik Baik Baik
9	IP Switcher	1 Unit	Baik
10	HT for Secured Communication NX -328 KENWOOD, Termasuk: -Rig for secured communication NX-800 (H)/KENWOOD	5 Unit 1 Unit	Baik Baik
11	Camera DSLR + Lens Kit EOS 700 KIT 1/CANON, Termasuk: -Lensa tele EF-S 55-250mm CANON	1 Unit 1 Unit	Baik Baik
12	Handycam HC-VX980/ PANASONIC	1 Unit	Baik
13	Smartphone Double Sim Card J7 SAMSUNG	5 Unit	Baik
14	Digital audio recorder WS-852/ OLYMPUS, Termasuk : -Audio monitoring system BEA Dig MICRO	1 Unit	Baik
15	Lock Picking, Terdiri dari : -Electro Lock Pick -Manual Lock Pick	1 Unit 1 Unit	Baik Baik
16	GPS Tracking Enduro plus 3G	1 Unit	Baik

Sumber: Satintelkam Polres Magelang tahun 2022

3.1.2.4 Metode Penggalangan (*Method*)

Unit Politik Satintelkam Polres Magelang memiliki tanggung jawab terkait seluruh kegiatan yang berhubungan dengan politik di wilayah hukum Polres Magelang. Salah satu kegiatan politik yang memiliki kerawanan tinggi yaitu pelaksanaan Pilkades. Berdasarkan wawancara dengan anggota Unit Politik Brigadir Wisnu Prabowo, S.H yang menyatakan bahwa “Pilkades lebih rawan dibandingkan dengan Pemilu ataupun Pilkada karena antara calon satu dengan yang lain saling kenal, tetapi memiliki keinginan untuk menang sehingga cukup sering terjadi perpecahan.”

Metode pelaksanaan penggalangan Unit Politik Satintelkam Polres Magelang bergantung pada laporan yang diberikan oleh masing-masing Polsek yang wilayahnya melaksanakan Pilkades. Penggalangan yang dilakukan Unit Politik Satintelkam cenderung saat ada kejadian insidentil maupun laporan dari masyarakat. Hal ini berdasarkan observasi terhadap pelaksanaan tugas penggalangan intelejen yang terjadi di Desa Blondo terdapat laporan bahwa adanya indikasi suap yang dilakukan calon Pilkades nomor 4. Unit Politik yang sebelumnya tidak melaksanakan penggalangan dari hasil Pulbaket Intel Polsek, ketika mendapat laporan dari masyarakat Desa Blondo terkait suap langsung bergerak menuju lokasi untuk mencari informasi dan melakukan penggalangan kepada Badan Permusyawaratan Desa. Pelaksanaan penggalangan yang dilakukan karena kejadian insidentil ini disebabkan dari beberapa faktor salah satunya menipisnya anggaran dengan pernyataan Brigadir Yoga Pinandita Suharsono bahwa “Penggalangan pada kegiatan Pilkades yang pelaksanaannya akhir tahun menjadi tantangan tersendiri karena anggaran yang dimiliki Unit Politik Satintelkam Polres Magelang sudah menipis. Maka dari itu penggalangan tidak bisa dilakukan dengan maksimal ke seluruh lapisan masyarakat desa”.

3.1.3 Kondisi Awal Sistem Metode Kerja Penggalangan Unit Politik Satintelkam guna Mewujudkan Keamanan Pilkades di Wilayah Hukum Polres Magelang

Penggalangan oleh Unit Politik Satintelkam yaitu suatu upaya yang dilakukan baik secara terbuka maupun tertutup untuk menciptakan kondisi yang menguntungkan bagi institusi Polri yaitu keadaan masyarakat aman dan tertib tanpa adanya konflik. Apabila terdapat suatu gejolak dalam masyarakat, maka disinilah pentingnya penggalangan intelejen dilakukan supaya menekan potensi gangguan untuk menjadi gangguan nyata.

Pelaksanaan Penggalangan terkait rangkaian pelaksanaan Pilkades oleh Unit Politik Satintelkam Polres Magelang melalui beberapa tahapan. Langkah yang dilakukan dimulai dengan merumuskan perencanaan, dilanjutkan dengan pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian pada pelaksanaan tugas sehingga cipta kondisi yang dilakukan terhadap sasaran berjalan dengan baik.

3.1.3.1 Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan penggalangan Unit Politik Satintelkam terkait rangkaian kegiatan Pilkades memperhatikan perkembangan situasi Kamtibmas dan potensi gangguan di wilayah Kabupaten Magelang. Salah satu potensi gangguan yang ada di wilayah Kabupaten Magelang adalah keadaan masyarakat desa yang mudah terprovokasi. Hal ini berdasarkan telaah dokumen laporan informasi pelaksanaan Pilkades pada tahun 2016 yang terjadi kerusuhan di 2 desa yaitu Desa Banaran dari Kecamatan Grabag dan Desa Sengi dari Kecamatan Dukun. Selanjutnya, dari laporan informasi dijelaskan juga bahwa pada Pilkades tahun 2019 terjadi permasalahan di Desa Blondo dari Kecamatan Mungkid.

Rangkaian pelaksanaan Pilkades telah disosialisasikan oleh Balai Permusyawaratan Desa (BPD), kemudian langkah perencanaan dilakukan Unit Intel Polsek dengan melakukan pengumpulan bahan keterangan (Pulbaket) dengan Pemerintahan Desa dan panitia penyelenggara Pilkades. Dalam pelaksanaan Pulbaket, Unit Politik Satintelkam

mengerahkan anggota intel Polsek yang pada wilayah hukumnya terdapat desa yang melaksanakan Pilkades.

3.1.3.2 Pengorganisasian (*Organizing*)

Penulis melakukan observasi terkait pengorganisasian anggota Satintelkam Unit Politik dalam pembagian tugas dilakukan oleh Kanit Politik Satintelkam Polres Magelang. Namun, faktanya tidak ada pengorganisasian yang jelas dikarenakan proses Pulbaket diserahkan kepada Unit Intel Polsek. Setelah hasil Pulbaket diserahkan kepada Unit Politik Satintelkam, tidak ada tindak lanjut turun langsung ke lapangan oleh Unit Politik Satintelkam dan hanya menelan mentah hasil dari Pulbaket Intel Polsek. Berdasarkan perkiraan singkat Satintelkam Unit Politik, desa yang memiliki kerawanan menjadi atensi bagi pelaksanaan penggalangan intelejen sehingga diharapkan cipta kondisi baik itu dari masyarakat maupun dari pihak Panitia Pilkades dapat berperan secara tanggung jawab menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Namun, penggalangan dilakukan oleh Unit Politik Satintelkam ketika ada atensi dan kejadian insidental saja sehingga proses pengorganisasian tidak berjalan dengan baik.

3.1.3.3 Pelaksanaan (*Actuating*)

Penggalangan intelejen Unit Politik Satintelkam Polres Magelang dilaksanakan setiap ada kejadian-kejadian menonjol di wilayah hukum Polres Magelang. Salah satu kegiatan yang menjadi atensi yaitu rangkaian kegiatan Pilkades. Penggalangan yang dilakukan oleh Unit Politik Satintelkam Polres Magelang memegang peranan penting untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban Pilkades. Hasil Pulbaket Intel Polsek berupa informasi terkait desa yang memiliki tingkat kerawanan yang tinggi dibandingkan dengan desa lainnya seharusnya menjadi acuan pelaksanaan penggalangan Unit Politik Satintelkam. Namun, Penggalangan Unit Politik Satintelkam hanya dilakukan ketika ada laporan dari masyarakat sebagaimana hasil observasi penulis yang mana

penggalangan Unit Politik Satintelkam yang dilakukan di Desa Blondo karena adanya indikasi suap.

Pelaksanaan penggalangan Unit Politik Satintelkam Polres Magelang masih mengandalkan perkiraan singkat (Kirkat) dari jajaran Intelkam Polsek setempat tanpa turun ke lapangan secara langsung. Padahal jumlah anggota personel Intelkam jajaran Polsek hanya 1 sampai 2 orang sehingga tidak optimal untuk mencapai tujuan penggalangan yaitu menciptakan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat desa secara keseluruhan. Selain itu, penggalangan Unit Politik Satintelkam Polres Magelang juga tidak hanya fokus terhadap kegiatan Pilkades saja, tetapi masih banyak kegiatan politik lainnya.

3.1.3.4 Pengendalian (*Controlling*)

Pengendalian personel dalam pelaksanaan penggalangan intelejen terkait rangkaian kegiatan Pilkades dilakukan oleh Kasatintelkam dengan memantau hasil laporan pelaksanaan penggalangan melalui *whatsapp group*. Pelaksanaan laporan melalui *whatsapp group* ini memudahkan dalam hal kecepatan pelaporan dan agar seluruh anggota ikut memonitor adanya informasi terbaru yang terjadi di lapangan terlebih lagi pelaksanaan rangkaian Pilkades yang sangat dinamis. Kegiatan Pilkades menjadi tanggung jawab Unit Politik dibawah pengendalian dan pengawasan Kepala Unit Politik Satintelkam dalam pelaksanaan tugas dan laporan yang diteruskan kepada pimpinan. Namun, pembuatan administrasi intelejen tidak dilaksanakan dengan cepat sehingga membuat hambatan dalam pengarsipan hasil pelaksanaan penggalangan. Hal ini berdasarkan wawancara dari Bintara urusan administrasi Unit Politik yaitu Brigadir Wisnu Prabowo S.H yang mengatakan “Hasil penggalangan tahun 2022 seluruhnya sekitar 21 kegiatan, tetapi untuk data seluruh kegiatannya bukan saya semua yang buat jadi saya tidak punya seluruh data arsipnya.”

Selain itu, pada saat pelaksanaan penggalangan tidak ada pengawasan dan evaluasi Kepala Unit Politik terhadap anggota Unit Politik

sehingga cenderung melakukan penggalangan hanya sebagai formalitas kegiatan yang dilaporkan kepada pimpinan. Kepala Unit Politik juga tidak pernah memberikan evaluasi kegiatan penggalangan yang dilakukan oleh anggotanya. Pada saat pelaksanaan pemungutan suara Pilkades 2022, Kepala Unit Politik juga tidak monitor secara *mobile* yang mengakibatkan tidak bisa mengirimkan pasuka pengendalian massa dari Fungsi Sabhara yang *stand by* untuk mengatasi konvoi kendaraan bermotor yang mengganggu kamtibmas di Desa Sucen.

3.2 Faktor yang Mempengaruhi Kondisi Awal

Penelitian yang dilakukan penulis terkait Optmimalisasi Penggalangan Unit Politik Satintelkam guna Mewujudkan Keamanan dan Ketertiban Pilkades di Wilayah Hukum Polres Magelang menggunakan teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi, dan studi dokumen. Dari data primer maupun sekunder yang didapatkan oleh penulis, kemudian penulis menemukan berbagai faktor yang mempengaruhi penggalangan Unit Politik Satintelkam Polres Magelang yang kurang optimal. Faktor-faktor tersebut diuraikan berdasarkan analisis SWOT yang dibedakan menjadi faktor internal dan faktor eksternal sebagai berikut:

3.2.1 Faktor Internal

Faktor internal yaitu penyebab terjadinya sesuatu yang berasal dari dalam institusi Polri itu sendiri. Pada penelitian ini, faktor internalnya yaitu Unit Politik Satintelkam Polres Magelang. Berdasarkan teori analisis SWOT yang menjadi pisau analisis, maka faktor internal yang mempengaruhi kinerja penggalangan Unit Politik Satintelkam Polres Magelang meliputi:

a. Kekuatan (*Strength*)

Kekuatan merupakan suatu keunggulan ataupun kelebihan yang dimiliki oleh organisasi yang belum tentu dimiliki oleh pihak lain sehingga organisasi tersebut memiliki nilai lebih. Dalam penelitian yang dilakukan

oleh penulis, Unit Politik Satintelkam memiliki kelebihan yang dapat mendukung pelaksanaan penggalangan intelegen terkait rangkaian Pilkadaes 2022, antara lain:

1. Koordinasi

Unit Politik Satintelkam memiliki koordinasi yang baik baik itu secara internal dalam institusi maupun dengan pihak eksternal. Dengan adanya koordinasi yang baik maka memudahkan Unit Politik Satintelkam dalam melakukan penggalangan intelegen dengan pihak eksternal. Pada penelitian yang berfokus pada penggalangan terhadap kegiatan Pilkadaes, hubungan baik dengan pihak eksternal sangat menguntungkan tugas Unit Politik Satintelkam dalam melakukan cipta kondisi Kamtibmas. Sebagai contoh, penggalangan yang dilakukan penulis bersama Unit Politik Satintelkam terhadap desa yang memiliki kerawanan seperti Desa Sengi, Desa Banaran, dan Desa Blondo dapat dilaksanakan dengan tangan terbuka dari pihak Panitia Pilkadaes.

2. Loyalitas Anggota Unit I Politik

Pelaksanaan tugas penggalangan intelegen, setiap anggota Unit Politik memiliki semangat yang tinggi dan melaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Selain itu, orientasi anggota dalam melaksanakan tugasnya juga untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bukan untuk mencari sebuah materi. Kepala Unit I Politik juga selalu menegaskan anggotanya agar selalu bekerja ikhlas dan bersyukur atas apa yang dipercayakan negara kepada kita. Penulis mendapatkan ilmu karena seluruh personel juga terbuka dalam mengajarkan cara-cara melakukan penggalangan sehingga maksud dan tujuan dari penggalangan tersamarkan. Berikut hasil wawancara dengan Bripka Setiadi Prasetyo yang mengatakan bahwa:

Dalam melaksanakan tugas penggalangan, kunci utamanya adalah ikhlas karena tanpa adanya rasa ikhlas maka kita tidak akan mendapatkan informasi yang detail dan kita harus sadar bahwa yang membuat situasi kondisi aman dan tertib adalah bagaimana kita dari Unit Politik Satintelkam ini mampu melakukan penggalangan masyarakat dengan baik.

b. Kelemahan (*Weakness*)

Kelemahan dari suatu organisasi merupakan hal yang harus diperhatikan dan ditutupi dengan kelebihan yang lain. Penulis menemukan titik kelemahan dari Unit Politik Satintelkam yang kemudian harus menjadi evaluasi, yaitu:

1. Sumber Daya Manusia

Salah satu kendali utama di Unit Politik Satintelkam Polres Magelang adalah pada Sumber Daya Manusia, baik itu dari kualitas maupun jumlah personelnya. Jumlah personel Unit Politik Satintelkam Polres Magelang yaitu 7 personel dengan rincian 1 kanit dan 6 anggota. Jumlah ini sangat terbatas untuk melakukan *back up* kepada anggota Polsek jajaran mengingat kondisi Polsek di wilayah hukum Polres Magelang hanya memiliki 1 anggota tiap polseknya padahal luas wilayah kecamatannya sangat luas. Selain itu, pembagian tugas pun sangat kekurangan personel karena ada yang harus fokus di administrasi dan ada yang harus terjun ke lapangan. Dari segi kualitas, dari 7 personel, 3 personel belum melaksanakan Pendidikan pengembangan fungsi intelkam termasuk seorang Kepala Unitnya, maka perlu adanya perhatian dari Polres Magelang dalam meningkatkan pendidikan pengembangan anggotanya terutama pada pimpinan suatu struktur organisasinya.

2. Anggaran

Berdasarkan Rendisgar tahun 2022 Satintelkam memperoleh anggaran sebesar Rp.921.100.000 per tahun yang dibagi untuk keperluan 4 Unit. Pelaksanaan tugas tentunya sangat membutuhkan dukungan anggaran baik itu kegiatan rutin maupun insidentil. Salah satu kegiatan insidentil saat ini yaitu Pilkades yang membutuhkan anggaran yang cukup besar karena kegiatan Unit Politik Satintelkam dalam melakukan pulbaket maupun penggalangan dilakukan dari tahap pemilihan calon, kampanye, pelaksanaan pemungutan suara, dan penghitungan suara. Berdasarkan wawancara dengan Bripka Heri Wijayanto S.H. terkait anggaran yang mengatakan:

Dalam melaksanakan kegiatan baik itu deteksi dini ataupun penggalangan intelejen yang saat ini berfokus pada rangkaian Pilkadaes 2022, kami sering menggunakan kendaraan pribadi dan biaya pribadi baik itu bensin maupun untuk menggalang warga masyarakat. Terkadang kita harus mengeluarkan biaya untuk melakukan cipta kondisi sehingga kegiatan yang mengganggu situasi Kamtibmas dapat direduksi. Biaya situasional tersebut harus kami tangani pribadi karena anggaran yang sangat terbatas.

3. Arsip dokumen

Kelemahan Unit Politik Satintelkam yang ditemukan oleh penulis dalam hal arsip dokumen ini, yaitu setelah pelaksanaan kegiatan pulbaket dan penggalangan, laporan kegiatan dilakukan melalui *whatsapp*. Untuk pembuatan laporan secara resmi melalui word tidak dilakukan dengan segera sehingga dalam suatu produk dokumen banyak data yang tidak tersip dengan baik. Jika sesuai dengan prosedur yang berlaku, Satintelkam memiliki kewajiban dalam membuat laporan informasi yang harus diteruskan kepada pimpinan dengan segera sehingga pimpinan dapat membuat suatu keputusan yang tepat. Hal ini juga dikarenakan kurangnya personel yang berada di Unit Politik Satintelkam sehingga pembagian tugas di lapangan dan pembuatan administrasi kurang optimal.

3.2.2 Faktor Eksternal

Faktor eksternal merupakan sesuatu yang mempengaruhi kinerja Unit Politik Satintelkam dari luar institusi Polri. Berdasarkan analisis SWOT, faktor eksternal yang mempengaruhi meliputi:

a. Peluang (*Opportunity*)

Peluang merupakan sesuatu dari luar instritusi Polri yang memberikan keunggulan dan kemudahan bagi pelaksanaan tugas Polri untuk menciptakan kondisi Kamtibmas yang aman dan tertib. Berikut peluang yang dimiliki Unit Politik Satintelkam Polres Magelang dalam melaksanakan penggalangan terkait Pilkadaes:

1. Panitia Pilkadaes dan Lembaga Desa

Adanya rasa membutuhkan dari pihak Panitia Pilkadaes dan Pemerintahan Desa terhadap hadirnya polisi dalam mengamankan

Pilkades membuat penggalangan intelegen menjadi mudah dilakukan. Kesadaran Panitia Pilkades ini membuat terbuka dalam memberikan informasi kepada pihak Unit Politik Satintelkam terkait adanya potensi gangguan yang ada di masyarakat. Saat pelaksanaan penggalangan intelegen, Panitia Pilkades juga selalu menerima masukan dari Unit Politik Satintelkam baik itu terkait mengoptimalkan sosialisasi kepada masyarakat maupun kepada calon Kepala Desa agar lebih mengendalikan aktivitas pendukungnya.

2. Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama

Kondisi masyarakat menjadi keunggulan yang dimiliki oleh Unit Politik Satintelkam dalam melaksanakan penggalangan intelegen untuk mewujudkan keamanan terselenggaranya Pilkades 2022. Hal ini dikarenakan tokoh masyarakat dan tokoh agama memiliki antusias positif ketika Unit Politik Satintelkam melaksanakan penggalangan yang bertujuan untuk menjaga situasi kondisi masyarakat agar tidak terpengaruh dengan adanya provokasi ataupun intervensi yang muncul. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Bripka Setiadi yang mengatakan bahwa:

Masyarakat itu masih membutuhkan kehadiran polisi, kita bisa lihat pada aduan masyarakat berupa suap di Desa Blondo. Lalu, Unit Politik bergerak untuk memastikan kejadian tersebut. Respon masyarakat adalah rasa tenang atas kehadiran polisi karena mereka menganggap kita bisa menyelesaikan permasalahan mereka. Maka dari itu kita harus profesional dalam melaksanakan penggalangan terhadap kegiatan Pilkades.

Bahkan, tokoh masyarakat merasa senang apabila dikunjungi oleh Unit Politik Satintelkam dan akan berusaha semaksimal mungkin membantu menjaga Kamtibmas karena tujuan dari Pilkades ini adalah memilih pemimpin desa yang mumpuni tanpa menimbulkan suatu perpecahan dalam suatu masyarakat.

b. Ancaman (*Threat*)

Ancaman merupakan sesuatu yang berasal dari luar suatu organisasi Polri yang menjadi penghambat ataupun penghalang tercapainya tujuan suatu organisasi. Berikut beberapa ancaman yang akan

menghalangi tercapainya tujuan penggalangan Unit Politik Satintelkam untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban Pilkades.

1. Luas Wilayah Kabupaten Magelang

Wilayah Kabupaten Magelang memiliki luas daerah sebesar 1.085,73 km² terdiri atas 21 kecamatan. Hal ini menjadi kendala dikarenakan sulitnya menjangkau seluruh komponen masyarakat untuk dilakukan penggalangan oleh Unit Politik Satintelkam. Selain luas wilayahnya, jumlah penduduk di kecamatan yang melaksanakan Pilkades atau sering disebut dengan DPT (Daftar Pemilih Tetap) juga cukup banyak. Hal ini tidak sebanding dengan personel Unit Intel di masing-masing Polsek.

2. Jumlah Ormas yang Banyak

Dengan adanya Ormas yang banyak berkembang di wilayah Kabupaten Magelang maka perlu adanya kewaspadaan dari Unit Politik Satintelkam sehingga mampu mengantisipasi apabila ada keterlibatan Ormas pada pelaksanaan Pilkades. Data ormas yang terdaftar di Kantor KESBANGPOL Kabupaten Magelang berjumlah 148, jumlah ini dikatakan banyak mengingat masih ada Ormas yang belum terdaftar secara resmi.

3. Kondisi SDM Masyarakat Desa

Kerawanan dalam pelaksanaan Pilkades ini sangat tinggi dikarenakan masyarakat desa mengenal dan bersentuhan langsung dengan calon Kepala Desa. Aktivitas pendukung calon Kepala Desa juga cukup fanatik dan masyarakat desa mudah terprovokasi dengan isu yang belum tentu benar.

BAB IV

LANGKAH – LANGKAH PEMECAHAN MASALAH

4.1 Kondisi yang Diharapkan

Kondisi yang diharapkan adalah titik temu dimana penggalangan yang dilaksanakan oleh Unit Politik Satintelkam Polres Magelang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam hal ini Perkabik nomor 3 tahun 2013. Pelaksanaan yang sesuai dengan Perkabik nomor 3 tahun 2013 ini diharapkan mampu meraih tujuan dari penggalangan yaitu terciptanya kondisi aman dan tertib pada kegiatan Pilkades.

4.1.1 Upaya Sumber Daya Organisasi Satintelkam Polres Magelang guna Mewujudkan Keamanan dan Ketertiban Pilkades

Pelaksanaan penggalangan Satintelkam Polres Magelang memiliki permasalahan baik dari internal maupun eksternal. Hal ini berdasarkan hasil telaah dokumen, observasi lapangan, dan wawancara baik dari anggota Satintelkam Polres Magelang maupun pihak pemerintahan desa. Penelitian yang dilakukan penulis fokus terhadap sumber daya organisasi Satintelkam Polres Magelang. Sebagai pisau analisis, penulis menggunakan teori manajemen yaitu penjabaran unsur manajemen dari George R. Terry (2013) antara lain *man, money, method, and material*.

4.1.1.1 Sumber Daya Manusia (*Man*)

Hasil analisa penulis terkait sumber daya manusia Unit Politik Satintelkam Polres Magelang yaitu masih ditemukannya beberapa permasalahan yang belum sesuai dengan penggalangan Satintelkam yang ideal menurut Perkabik no 3 tahun 2013 tentang penggalangan Satintelkam Polri. Berikut merupakan hasil analisa penulis terkait permasalahan sumber daya manusia Unit Politik Satintelkam Polres Magelang.

a. Secara Kuantitas

Berdasarkan data yang didapatkan dari Bintara Urusan Administrasi (Baurmintu) Satintelkam Polres Magelang, jumlah anggota personel

Satintelkam Polres Magelang yaitu 42 orang yang dipimpin oleh Kepala Satintelkam. Dalam Satintelkam Polres Magelang terdapat 4 Unit yang dibagi menjadi Unit I Politik, Unit II Ekonomi, Unit III Sosial Budaya, dan Unit IV Keamanan. Dalam kegiatan Pilkades, Unit Politik menjadi ujung tombak pelaksanaan penggalangan intelegen untuk cipta kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat selama rangkaian Pilkades. Unit Politik Satintelkam Polres Magelang memiliki anggota sebanyak 7 orang yang dipimpin oleh Kepala Unit I Politik Satintelkam yaitu AIPTU Tri Laksana Sumaedi, S.Pd. Jumlah anggota Unit Politik Satintelkam Polres Magelang ini belum memenuhi standar SOTK Polres tipe D yang diatur dalam Perpol Nomor 2 Tahun 2021 tentang SOTK Polres dan Polsek.

Sumber daya manusia atau personel anggota Unit Politik Satintelkam Polres Magelang diharapkan bisa memenuhi jumlah personel yang diatur dalam Perpol Nomor 2 Tahun 2021 terkait Daftar Standar Personel (DSP) guna melaksanakan kegiatan penggalangan Unit Politik Satintelkam Polres Magelang. Menurut peraturan tersebut, secara struktural Polres Magelang masuk dalam Polres tipe D. Kondisi yang diharapkan dari DSP Polres tipe D untuk Unit Politik Satintelkam Polres Magelang yaitu 11 orang, yang terdiri dari 1 orang Kanit Politik dan 10 orang anggota Bintara.

b. Secara Kualitas

Selain perlunya kuantitas personel yang memadai, upaya pelaksanaan penggalangan juga membutuhkan peningkatan kualitas dari sumber daya manusia yang ada. Berdasarkan tabel 3., dari 42 personel Satintelkam Polres Magelang, hanya ada 17 orang yang telah melaksanakan Pendidikan dan Pengembangan Spesialis (Dikbangspes) Intelkam Polri, sedangkan pada Unit Politik Satintelkam Polres Magelang yang terdiri dari 7 personel, hanya 3 orang yang sudah melaksanakan Dikbangspes Intelkam Polri dan 1 orang yang melaksanakan Pendidikan Dasar (Dikdas) Intelkam. Bahkan, seorang Kepala Unit Politik pun belum melaksanakan Dikdas maupun Dikbangspes Intelkam. Hal ini tentu harus

menjadi catatan kepada anggota Unit Politik Satintelkam Polres Magelang agar sadar terhadap profesionalisme dalam bekerja sehingga dapat melaksanakan penggalangan masyarakat terkait Pilkades.

Setiap anggota personel Unit Politik Satintelkam Polres Magelang wajib memiliki standar kompetensi yang memadai sehingga mampu mencapai tujuan penggalangan pada kegiatan Pilkades yaitu terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat. Kompetensi menjadi suatu tolak ukur profesionalisme anggota dan sebagai bahan evaluasi kinerja anggota personel Unit Politik Satintelkam Polres Magelang. Menurut Lyle Spencer dan Signe Spencer (1993), kompetensi adalah karakter sikap dan perilaku, atau kemauan serta kemampuan individual yang relatif stabil. Ketika menghadapi situasi dan tempat kerja yang terbentuk dari sinergi antara watak, konsep diri, motivasi internal, serta kapasitas pengetahuan konseptual. kompetensi dibagi menjadi 5 (lima) karakteristik, yaitu:

1. Motif (*motives*)

Motif dalam kompetensi merupakan sesuatu yang secara terus-menerus dipikirkan seseorang secara konsisten sehingga menimbulkan orang tersebut bertindak.

2. Sifat (*trait*)

Sifat dalam kompetensi memiliki arti watak yang membuat orang untuk berperilaku atau tindakan seseorang dalam merespon suatu hal dengan cara-cara tertentu sehingga menimbulkan perilaku yang layak diperlihatkan.

3. Konsep diri (*self-concept*)

Konsep diri dalam kompetensi merupakan suatu informasi yang ada pada individu. Contohnya, anggota Unit Politik harus mampu memahami informasi dari masyarakat desa untuk bisa melaksanakan penggalangan sehingga tujuan menciptakan keamanan dan ketertiban dalam kegiatan Pilkades terlaksana dengan baik.

4. Pengetahuan (*knowledge*)

Pengetahuan dalam kompetensi merupakan suatu informasi dalam bidang tertentu. Contohnya, anggota Unit Politik Satintelkam harus melaksanakan Dikbangspes dengan tujuan memiliki kemampuan spesifik dalam bidang tertentu sehingga mahir dalam melaksanakan tugas dalam bidangnya.

5. Keterampilan (*skill*)

Keterampilan dalam hal ini memiliki arti kemampuan untuk melaksanakan tugas fisik atau mental tertentu. Kompetensi keterampilan kognitif mencakup berpikir secara analitis dan berpikir secara konseptual. Contohnya, anggota Unit Politik Satintelkam harus terampil dalam mengkolaborasikan antara informasi yang dimiliki dengan situasi lingkungan masyarakat desa yang dihadapi saat melaksanakan penggalangan. Dengan demikian, masyarakat desa akan mengikuti apa yang diinginkan oleh pihak Unit Politik Satintelkam untuk mejaga Kamtibmas pada kegiatan Pilkades .

4.1.1.2 Anggaran (*Money*)

Kegiatan penggalangan intelegen sangat penting untuk menciptakan kondisi Kamtibmas terutama pada rangkaian kegiatan Pilkades. Namun, pada pelaksanaan penelitian yang dilakukan dengan triangulasi penelaahan dokumen dan wawancara terhadap anggota Unit Politik Satintelkam ternyata penggalangan yang dilakukan selama tahun 2022 yaitu sebanyak 21 kali. Jumlah ini sangat jauh berbeda dengan indeks yang ada pada DIPA Unit Politik Satintelkam Polres Magelang yaitu hanya untuk 8 kali penggalangan. Selain itu, dalam pelaksanaan penggalangan masih ditemukan anggota Unit Politik Satintelkam Polres Magelang yang menggunakan uang pribadi dalam membeli keperluan bahan bakar kendaraan.

Kondisi yang diharapkan dari perencanaan anggaran yaitu terlaksananya kegiatan dengan baik dengan anggaran yang dipenuhi oleh DIPA yang telah disahkan. Maka dari itu, perlu adanya evaluasi dalam

penyerapan anggaran sehingga dapat menjadi pedoman terhadap Rencana Pendistribusian Anggaran (Rendisgar) pada tahun berikutnya. Evaluasi anggaran ini perlu dilakukan untuk mendukung operasional tugas dan memenuhi kebutuhan pelaksanaan tugas sesuai dengan Perkabik Nomor 3 tahun 2013 tentang penggalangan Satintelkam Polri.

4.1.1.3 Sarana dan Prasarana (*Materia*)

Sarana dan prasarana memiliki peranan penting sebagai pendukung pelaksanaan penggalangan Unit Politik Satintelkam dalam kegiatan Pilkades. Sarana dan prasarana utama dalam pelaksanaan penggalangan Unit Politik Satintelkam Polres Magelang berupa kendaraan bermotor baik kendaraan R4 maupun R2. Pentingnya sarana prasarana ini dikarenakan wilayah hukum Polres Magelang yang sangat luas sehingga jarak antar desa satu dengan lainnya membutuhkan sarana yang memadai. Akan tetapi, kondisi sarana dan prasarana berupa kendaraan bermotor yang ada di Satintelkam Polres Magelang sangat kurang. Tidak ada pembagian kendaraan yang peruntukannya khusus digunakan oleh Unit Politik sehingga harus bergantian dengan Unit Satintelkam lainnya.

Untuk mengatasi keterbatasan sarana kendaraan, anggota terpaksa menggunakan mobil pribadi untuk keperluan dinas. Sarana dan prasarana yang terdapat di Satintelkam Polres Magelang sangat perlu diperhatikan terutama dalam kendaraan R4 yang masih harus bergantian dengan unit lain sehingga menghambat mobilitas anggota dalam melaksanakan penggalangan. Kondisi sarana dan prasarana yang diharapkan yaitu setidaknya setiap Unit Satintelkam Polres Magelang memiliki kendaraan R4 untuk mobilitas ke wilayah Kabupaten Magelang yang sangat luas.

4.1.1.4 Metode Penggalangan (*Method*)

Penggalangan merupakan kegiatan utama yang dilakukan oleh Unit Politik Satintelkam Polres Magelang untuk menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif terutama menjelang Pilkades. Proses pendekatan kepada masyarakat perlu dilakukan lebih dini jauh

sebelum pelaksanaan Pilkades sehingga terbentuk ikatan emosional yang baik antara masyarakat dan personel Unit Politik Satintelkam Polres Magelang. Namun, pada pelaksanaan penggalangan yang dilakukan yaitu dengan memanfaatkan Perkiraan singkat (Kirkat) dan Laporan Informasi dari pihak Intelkam Polsek. Kendala ini mengakibatkan penggalangan tidak mampu menciptakan kondisi masyarakat yang aman dan tertib serta memiliki ikatan emosional yang baik dengan pihak Intelkam.

Hal ini menjadi sebuah evaluasi dari penulis terkait penggalangan Unit Politik Satintelkam Polres Magelang yang harus turut terjun ke lapangan membantu dengan dukungan personel sehingga mengetahui dengan baik kondisi faktual setiap desa dengan baik. Pedoman dalam pelaksanaan penggalangan Unit Politik Satintelkam dalam kegiatan menghadapi Pilkades yaitu Perkabik Nomor 3 tahun 2013 tentang Penggalangan Satintelkam Polri. Terdapat prinsip-prinsip yang harus dipedomani dalam pelaksanaan penggalangan intelejen sesuai dengan Perkabik Nomor 3 tahun 2013 tentang Penggalangan Satintelkam Polri, yaitu:

- a. Kerahasiaan/clandestine, yaitu penggalangan dilakukan secara tertutup dan hanya diketahui oleh orang tertentu atau yang bersangkutan saja;
- b. Ketelitian, yaitu penggalangan dilakukan secara cermat dan saksama;
- c. Kedisiplinan, yaitu penggalangan dilakukan dengan dilandasi oleh kesadaran terhadap semua peraturan dan tata tertib yang telah ditetapkan;
- d. Keamanan, yaitu penggalangan dilakukan secara berhati-hati;
- e. Keberanian, yaitu penggalangan dilakukan dengan hati yang mantap dan rasa percaya diri dalam menghadapi kesulitan;
- f. Mengutamakan sumber informasi di sasaran utama (primer) secara langsung dan hindari sumber informasi kedua (sekunder).

4.1.2 Upaya Sistem Metode Kerja Penggalangan Unit Politik Satintelkam Polres Magelang guna Mewujudkan Keamanan dan Ketertiban Pilkades

Pada pelaksanaan penelitian, penulis membandingkan pelaksanaan tugas penggalangan Satintelkam Polres Magelang terhadap Pilkades dengan Perkabik Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penggalangan Satintelkam Polri. Tujuannya agar penulis dapat menganalisa kekurangan apa saja dalam pelaksanaan penggalangan yang dilakukan Satintelkam Polres Magelang. Berdasarkan teori manajemen yang dikemukakan oleh Geroge R. Terry (2013), dalam suatu organisasi diperlukan sebuah manajemen yang baik untuk dapat meningkatkan kinerja suatu organisasi. Dalam teori manajemen tersebut dibagi menjadi 4 tahapan yang perlu diperhatikan untuk selanjutnya dapat dilaksanakan, antara lain *planning* (perencanaan), *organizing* (pengorganisasian), *actuating* (pelaksanaan), dan *controlling* (pengawasan/pengendalian). Dengan mengacu pada 4 tahapan tersebut, diharapkan dapat meningkatkan sistem metode kerja Unit Politik Satintelkam Polres Magelang dalam melaksanakan penggalangan terkait kegiatan Pilkades sehingga terwujud keamanan dan ketertiban.

4.1.2.1 Perencanaan (*Planning*)

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis di lapangan, Unit Politik Satintelkam Polres Magelang kurang optimal dalam melaksanakan perencanaan penggalangan dalam rangkaian pelaksanaan Pilkades. Dijelaskan di Perkabik No 3 Tahun 2013 tentang penggalangan Saintelkam Polri bahwa tujuan dari penggalangan adalah cipta kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat yang memerlukan waktu untuk melakukan pendekatan emosional yang baik dengan masyarakat. Perencanaan dilakukan demi tercapainya tujuan dan pelaksanaan kegiatan menjadi lebih terarah. Perencanaan penggalangan intelijen diawali dengan melakukan analisa sasaran dijelaskan dalam pasal 25 ayat (1) antara lain:

a. Pengumpulan bahan-bahan keterangan sasaran

Pengumpulan baket sasaran dilakukan terhadap target penggalangan berupa sikap, motivasi / latar belakang, emosi, kebiasaan, mudah atau tidaknya dipengaruhi, mudah atau tidaknya penyebaran pesan atau jaringan, kedudukan social ekonomi, kedudukan dalam struktur kekuaran dan pendapat. Baket sasaran ini ditentukan oleh Kasatintelkam dengan hasil koordinasi dengan kanit dan anggota unit dari satintelkam, seperti yang dijelaskan dalam wawancara (15 November 2022) yang dilakukan peneliti terhadap Ba Unit I Politik Satintelkam Polres Magelang, Bripta Setiadi Prasetyo, mengatakan bahwa,

...pengumpulan baket sasaran kami buat dengan pertimbangan-pertimbangan seperti pengaruh yang dimiliki di masyarakat dan mudah tidaknya kita galang demi terwujudnya situasi yang kita harapkan jadi tidak sembarang orang kita galang dalam mewujudkan pilkades yang aman dan tertib di Kabupaten Magelang.

b. Pulbaket Intel Polsek dalam Kendali Unit Politik Satintelkam

Hasil Pulbaket yang dilaksanakan oleh Unit Intel Polsek diharuskan selalu berkoordinasi dengan Unit Politik. Koordinasi ini juga termasuk tindak lanjut dari Unit Politik Satintelkam untuk melakukan penggalangan setelah adanya Pulbaket dari Unit Intel Polsek. Tujuannya adalah agar Unit Politik Satintelkam mengetahui kondisi lapangan secara langsung baik lingkungan masyarakat maupun lingkungan sekitar.

4.1.2.2 Pengorganisasian (*Organizing*)

Berdasarkan Kirkat Satintelkam Unit I Politik, desa yang memiliki kerawanan menjadi atensi bagi pelaksanaan penggalangan intelejen sehingga diharapkan cipta kondisi baik itu dari masyarakat maupun dari pihak Panitia Pilkades dapat berperan secara tanggung jawab menjaga Kamtibmas. Pengorganiasian Pelaksanaan Penggalangan Unit Politik Satintelkam Polres Magelang dianggap masih belum tepat sasaran karena tidak adanya anggota Unit Politik Satintelkam yang menguasai tokoh masyarakat maupun tokoh agama untuk menghentikan aksi konvoi yang

mengganggu Kamtibmas ketika pemungutan suara Pilkades di Desa Sengi selesai dilaksanakan.

Pengorganisasian anggota Satintelkam Unit Politik dalam pembagian tugas dilakukan oleh Kepala Unit Politik Satintelkam seharusnya berdasarkan penguasaan bidangnya. Penempatan anggota yang tepat sasaran sesuai dengan kerawanan potensi gangguan, akan membuat penggalangan intelejen terlaksana sehingga cipta kondisi masyarakat akan terlaksana dengan baik. Hasil penggalangan intelejen yang efektif selain mampu melaksanakan cipta kondisi tentunya juga mendapatkan informasi terkait situasi masyarakat.

4.1.2.3 Pelaksanaan (*Actuating*)

Pelaksanaan penggalangan Unit Politik Satintelkam Polres Magelang yang dilakukan hanya mengandalkan Laporan Informasi dari Unit Intelkam Polsek yang mana anggota Unit Intelkam dalam suatu Polsek hanya 1-2 orang untuk permasalahan Ipoleksosbudkam tiap kecamatan. Tentu saja Laporan Informasi yang diberikan kurang maksimal karena tidak bisa menyentuh seluruh lini masyarakat desa yang akan melaksanakan Pilkades. Unit Politik Satintelkam Polres Magelang cenderung melakukan penggalangan disaat terdapat urgensi kejadian dan atensi dari pimpinan sehingga esensi dari penggalangan untuk cipta kondisi masyarakat tidak terwujud sesuai Perkabik Nomor 3 Tahun 2013.

Satintelkam Polres Magelang melakukan penggalangan di desa-desa dan memberikan pemahaman serta pesan-pesan kepada tokoh agama dan tokoh masyarakat yang ada di desa-desa yang akan melaksanakan pilkades dan nantinya membiarkan untuk masyarakat yang memikirkan dan memutuskan hal tersebut, sesuai dengan hasil wawancara dengan anggota unit I Satintelkam Polres Magelang, Bripta Heri Wijayanto, S.H. (10 Oktober 2022) yakni,

.....pola penggalangan yang kita lakukan dalam rangka pilkades ini dilakukan secara konstruktif persuasive yakni dengan membiarkan masyarakat untuk berpikir dan memutuskan apa yang sebaiknya dilakukan, kita sebagai penggalang datang hanya memberikan pesan dan

mengarahkan untuk mengetahui mana yang baik untuk kedepannya waktu pelaksanaan pilkades. Nantinya masyarakat yang memutuskan apa yang dilakukan guna pilkades yang akan dilaksanakan seluruh tahapannya bisa kondusif. Hasil dari keputusan masyarakat kita selalu monitor melalui chat whatsapp supaya bisa kita control juga.

4.1.2.4 Pengendalian (*Controlling*)

Penggalangan intelijen memerlukan pengendalian berupa pengawasan dan evaluasi terhadap jalannya kegiatan. Pengawasan dilaksanakan agar setiap anggota personel melakukan tugas dan tanggung jawabnya. Pengawasan dan evaluasi sangat diperlukan agar tujuan dan sasaran dapat tercapai dengan maksimal. Kasat Intelkam bertanggung jawab dalam melakukan pengawasan dan pengendalian kepada anggotanya. Kasat Intelkam mendelegasikan tanggung jawab tersebut kepada masing masing kepala unit yang ada, dengan pengawasan, pengendalian dan evaluasi yang berjenjang tersebut dapat menciptakan pengawasan dan pengendalian yang lebih baik. Pelaksanaan pengawasan diawali terlebih dahulu melalui apel dan AAP oleh Kasat Intelkam Polres Magelang. Pemberian AAP kepada anggota berisi Batasan dan kewajiban yang harus dilaksanakan serta pelaporan setiap kegiatan maupun kejadian ke grup *whatsapp* agar dapat di monitor.

Dalam pelaksanaannya ini, terjadi kendala karena AAP hanya dilakukan oleh Kasat saja, berdasarkan hasil observasi peneliti, Kanit tidak melaksanakan AAP dan hanya berkoordinasi melalui grup *whatsapp* Unit Politik sehingga seringkali terjadi *miss* komunikasi dalam pelaksanaan penggalangan yang dilakukan oleh Unit Politik. Berdasarkan hasil pengamatan peneliti inilah yang menyebabkan pelaksanaan penggalangan yang dilakukan oleh Unit Politik perlu ditingkatkan.

Pengendalian penggalangan atau evaluasi penggalangan bertujuan untuk dapat memastikan penggalangan dapat dilaksanakan secara maksimal dan dapat tercipta suatu kondisi yang diharapkan oleh penggalangan. Proses pengendalian yang dilakukan dengan cara Kasat Intelkam memonitor secara langsung maupun via grup *whatsapp* yang

dilaporkan kepada Kasat. Pelaporan tidak hanya dilaporkan via grup *whatsapp*, tetapi juga dituangkan kedalam produk penggalangan, yakni laporan hasil penggalangan yang dilaporkan secara berjenjang kepada pimpinan yang membutuhkan, dalam hal ini Kasat Intelkam hingga ke Kapolres Magelang untuk memonitor hasil penggalangan.

4.2 Langkah-Langkah Pemecahan Masalah

Pemecahan masalah merupakan inti dari pelaksanaan penelitian yang dilakukan oleh penulis untuk memberikan solusi mengenai permasalahan pada kondisi awal sumber daya organisasi penggalangan Unit Politik Satintelkam Polres Magelang guna mewujudkan keamanan dan ketertiban Pilkades. Penulis melakukan pengkajian untuk mencari *problem solving* melalui teori yang berkaitan, peraturan perundang-undangan, *Standar Operational Procedure* (SOP) penggalangan Satintelkam Polri dan aturan lainnya kemudian dibandingkan dengan kondisi faktual. Salah satu pedoman yang digunakan sebagai standar pelaksanaan penggalangan yaitu Perkabik Nomor 3 Tahun 2013 tentang penggalangan Satintelkam Polri. Pemecahan masalah ini dilakukan sebagai bentuk inovasi penulis guna meningkatkan pelaksanaan penggalangan Unit Politik Satintelkam dan mencapai tujuan yaitu mewujudkan keamanan dan ketertiban Pilkades.

4.2.1 Upaya Sumber Daya Organisasi Satintelkam Polres Magelang guna Mewujudkan Keamanan dan Ketertiban Pilkades

Unit Politik Satintelkam Polres Magelang memiliki permasalahan dalam Sumber Daya Organisasi yang mengakibatkan pelaksanaan penggalangan tidak optimal sehingga muncul permasalahan yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Untuk itu, penulis memberikan inovasi untuk memecahkan permasalahan Sumber Daya Organisasi sebagai berikut.

4.2.1.1 Sumber Daya Manusia (*Man*)

a. Secara Kuantitas

Permasalahan yang berkaitan dengan kuantitas sumber daya manusia di Unit Politik Satintelkam Polres Magelang berdasarkan Perpol Nomor 2 Tahun 2021 tentang SOTK tingkat Polres yaitu ketidaksesuaian jumlah personel DSP dan keadaan riil. Dengan jumlah yang masih dibawah ketentuan yang seharusnya Unit Politik Satintelkam Polres Magelang serta mempraktikan secara langsung pada saat pelaksanaan penelitian dan magang di Polres Magelang selama 3 bulan. Pelaksanaan penggalangan yang dilakukan yaitu dengan melebarkan sayap mendayagunakan Intelkam Polsek yang wilayah hukumnya melaksanakan Pilkades. Hal ini dapat menjadi alternatif dari kekurangan anggota personel secara kuantitas sehingga diharapkan dapat mencapai tujuan penggalangan yaitu terciptanya masyarakat yang kondusif dalam menyambut Pilkades .

b. Secara Kualitas

Pembahasan utama apabila berkaitan dengan kualitas yaitu nilai yang terdapat pada setiap individu personel Unit Politik Satintelkam. Kualitas personel dapat dilihat dari kompetensi baik secara pendidikan maupun pengalaman yang ada di dalam diri anggota Unit Politik Satintelkam Polres Magelang. Proses analisis penulis mengenai pemecahan masalah terhadap kualitas sumber daya manusia menggunakan teori kompetensi dari Spancer & Spancer yang pemecahan masalah dapat dibagi menjadi 5 (lima) karakteristik, yaitu:

1. Motif (*motives*)

Motif dalam kompetensi merupakan sesuatu yang secara terus-menerus dipikirkan seseorang secara konsisten sehingga menimbulkan orang tersebut bertindak. Contohnya, penggalangan Unit Politik secara konsisten akan membuat anggota Unit Politik Satintelkam mampu merumuskan tindakan yang harus dilakukan ketika menghadapi situasi yang dinamis.

2. Sifat (*trait*)

Sifat dalam kompetensi memiliki arti watak yang membuat orang untuk berperilaku atau tindakan seseorang dalam merespon suatu hal dengan cara-cara tertentu sehingga menimbulkan perilaku yang layak diperlihatkan. Sebagai contoh, pelaksanaan penggalangan Unit Politik Satintelkam terkait kegiatan Pilkades memerlukan kemampuan untuk membaca kondisi lingkungan dan masyarakat sehingga dapat membuat pendekatan emosional yang baik antara Unit Politik Satintelkam dengan masyarakat desa.

3. Konsep diri (*self-concept*)

Konsep diri dalam kompetensi merupakan suatu informasi yang ada pada individu. Contohnya, anggota Unit Politik harus mampu memahami informasi dari masyarakat desa untuk bisa melaksanakan penggalangan sehingga tujuan menciptakan kemandirian dan ketertiban dalam kegiatan Pilkades terlaksana dengan baik.

4. Pengetahuan (*knowledge*)

Pengetahuan dalam kompetensi merupakan suatu informasi dalam bidang tertentu. Contohnya, anggota Unit Politik Satintelkam harus melaksanakan Dikbangspes dengan tujuan memiliki kemampuan spesifik dalam bidang tertentu sehingga mahir dalam melaksanakan tugas dalam bidangnya.

5. Keterampilan (*skill*)

Keterampilan dalam hal ini memiliki arti kemampuan untuk melaksanakan tugas fisik atau mental tertentu. Kompetensi keterampilan kognitif mencakup berpikir secara analitis dan berpikir secara konseptual. Contohnya, anggota Unit Politik Satintelkam harus terampil dalam mengkolaborasikan antara informasi yang dimiliki dengan situasi lingkungan masyarakat desa yang dihadapi saat melaksanakan penggalangan. Dengan demikian, masyarakat

desa akan mengikuti apa yang diinginkan oleh pihak Unit Politik Satintelkam untuk menjaga Kamtibmas pada kegiatan Pilkades.

4.2.1.2 Anggaran (*Money*)

Anggaran memiliki peran penting dalam pelaksanaan penggalangan Unit Politik Satintelkam baik untuk memenuhi kegiatan operasional penggalangan maupun memenuhi kesejahteraan dari anggota guna menunjang pelaksanaan tugas yang optimal. Namun, berdasarkan observasi yang dilakukan menunjukkan bahwa kondisi faktual di lapangan masih menuntut anggota menggunakan dana pribadi untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar dari kendaraan. Setelah dilakukan penelitian berupa penelaahan dokumen dan wawancara terhadap anggota Unit Politik Satintelkam, ternyata penyerapan anggaran yang dilakukan tidak sesuai dengan rendisgar yang diberikan untuk Unit Politik Satintelkam Polres Magelang. Untuk itu, perlu adanya evaluasi terhadap Rendisgar untuk menyesuaikan antara anggaran penggalangan intelejen yang indeksinya dilaksanakan sebanyak 8 kali, secara faktual dilaksanakan 21 kali.

4.2.1.3 Sarana dan Prasarana (*Material*)

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas penggalangan Unit Politik yaitu sarana kendaraan R4 yang masih digunakan secara bergiliran oleh semua Unit Satintelkam. Perlu adanya pengajuan terhadap pimpinan dari Kepala Satintelkam kepada Kapolres Magelang terkait kelengkapan sarana kendaraan R4. Setidaknya setiap Unit memiliki kendaraan R4 yang dapat digunakan secara mandiri untuk tiap Unit sehingga dalam pelaksanaan penggalangan yang mana wilayah Kabupaten Magelang yang sangat luas membutuhkan akomodasi untuk mencapai wilayah desa yang dituju.

4.2.1.4 Metode Penggalangan (*Method*)

Metode penggalangan yang tepat menjadi kunci utama menciptakan kondisi keamanan dan ketertiban yang kondusif. Wilayah Kabupaten Magelang yang sangat luas sehingga membuat Unit Intelkam Polsek sulit

menjangkau seluruh wilayah desa yang melaksanakan Pilkades . Untuk itu, penulis memberikan saran kepada Unit Politik Satintelkam Polres Magelang untuk melakukan analisis data dokumen Pilkades tahun 2016 dan 2019, hasil wawancara dengan Unit Politik Satintelkam Polres Magelang, dan hasil Kirkat Unit Intelkam Polsek. Penulis memberikan saran agar anggota Unit Politik lebih berperan aktif turun ke lapangan terutama pada wilayah yang pada Pilkades sebelumnya mengalami konflik. Dengan demikian, kekosongan struktur Unit Intelkam Polsek dapat teratasi dengan dukungan dan bantuan dari anggota Unit Politik Satintelkam Polres Magelang.

4.2.2 Upaya Sistem Metode Kerja Penggalangan Unit Politik Satintelkam Polres Magelang guna Mewujudkan Keamanan dan Ketertiban Pilkades

Permasalahan dari Sistem Metode Kerja penggalangan Unit Politik Satintelkam Polres Magelang guna mewujudkan keamanan dan ketertiban pilkades yang telah dianalisa oleh penulis menggunakan teori manajemen yang dikemukakan oleh Geroge R. Terry (2013). Setelah melakukan analisa, penulis memberikan inovasi untuk memecahkan permasalahan Sistem Metode Kerja penggalangan Unit Politik Satintelkam dalam rangka kegiatan Pilkades sebagai berikut.

4.2.2.1 Perencanaan (*Planning*)

Permasalahan dalam perencanaan Unit Politik Satintelkam Polres Magelang yaitu tidak dibentuk rencana yang jelas dalam pelaksanaan penggalangan ketika telah disosialisasikan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) akan ada Pilkades. Selain itu, sasaran yang dibuat oleh Kanit Politik Satintelkam Polres Magelang tidak spesifik ke arah mana fokus pelaksanaan penggalangan intelejen sehingga anggota Unit Politik pun hanya akan bergerak Ketika ada kejadian insidental tanpa rencana yang matang.

Melihat perencanaan yang kurang baik, penulis menganalisa bahwa pergerakan anggota sangat dipengaruhi oleh kejelasan perintah dari pimpinannya. Dalam hal ini, Kanit Politik Satintelkam Polres Magelang harus mampu merencanakan penggalangan intelejen secara spesifik. Sasaran penggalangan Unit Politik tidak serta merta kepada masyarakat desa saja tetapi harus lebih mendetail dan terarah kepada pihak yang berkepentingan. Penggalangan intelejen diarahkan kepada masyarakat, panitia Pilkades, dan perangkat desa.

4.2.2.2 Pengorganisasian (*Organizing*)

Pengorganisasian anggota Unit Politik Satintelkam Polres Magelang harus dilakukan secara efektif karena kendala kekurangan personel. Pada pengorganisasian penggalangan terkait rangkaian Pilkades , hanya diperhatikan pada kemampuan masing-masing anggota berdasarkan sudah atau belum melaksanakan Dikbangspes. Selain itu, penulis melihat bahwa penggalangan intelejen terkait Pilkades ini kurang memanfaatkan anggota Polres Magelang untuk mengemban fungsi intelejen.

Dari permasalahan di atas, penulis memberikan solusi permasalahan yang bisa dilakukan, yaitu:

a. *Plotting* anggota berdasarkan tempat tinggal

Dalam melaksanakan penggalangan intelejen, perlu pemahaman situasi masyarakat dan lingkungan setempat. Dengan mem-*plotting* anggota Unit Politik untuk melakukan penggalangan terhadap desa terdekat yang melaksanakan Pilkades, maka akan memudahkan anggota Unit Politik untuk membentuk ikatan emosional yang baik sehingga tidak terjadi hal-hal provokasi yang akan menimbulkan sebuah konflik. Selain itu, anggota Unit Politik juga mudah dalam mendapatkan informasi dari masyarakat sekitar apabila ditemukan isu-isu negatif dapat dilaporkan dan dirapatkan bersama anggota Unit Politik lainnya ketika berada di Polres Magelang untuk dilakukan penggalangan yang lebih intensif.

- b. Menghimbau seluruh anggota Polres Magelang untuk mengemban fungsi Intelkam.

Keterbatasan anggota Unit Politik tidak seharusnya menjadi alasan bagi Polri untuk meraih kesempurnaan pelaksanaan tugas. Hal ini dikarenakan kondisi anggota Polri dimana pun pasti mengalami kekurangan anggota. Penulis memberikan solusi bagi Unit Politik Satintelkam Polres Magelang untuk berperan aktif menghimbau seluruh anggota Polres Magelang agar mengemban fungsi intelejen.

4.2.2.3 Pelaksanaan (*Actuating*)

Pelaksanaan penggalangan Unit Politik Satintelkam Polres Magelang belum bisa memenuhi pasal 3 Perkabik Nomor 3 Tahun 2013 mengenai kegunaan penggalangan Intelejen Kepolisian yang intinya mencegah segala bentuk perbuatan yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Berdasarkan observasi penulis, Unit Politik Satintelkam Polres Magelang hanya bergantung pada laporan informasi dan perkiraan cepat dari Unit Intelkam Polsek tanpa adanya survei lapangan secara langsung kecuali memang ada kejadian insidentil. Akibatnya, pelaksanaan Pilkades tidak sesuai dengan harapan yang diinginkan karena masih terjadi keributan berupa konvoi kemenangan yang mengganggu Kamtibmas terutama transportasi dan kenyamanan warga sekitar. Padahal konflik ini terjadi pada desa yang sebenarnya telah menjadi atensi karena terjadi keributan juga pada Pilkades tahun 2016.

Oleh karena itu, penulis melakukan penelitian dengan triangulasi antara dokumen laporan hasil pelaksanaan Pilkades tahun 2016 dan 2019, wawancara dengan anggota Unit Politik Satintelkam Polres Magelang, dan observasi lapangan terhadap Unit Intelkam Polsek serta panitia penyelenggara Pilkades untuk mencari pemecahan masalah. Penggalangan pada Pilkades sangat penting karena Pilkades merupakan pesta demokrasi dengan kerawanan tinggi. Penjabaran pemecahan masalah dari penulis terkait penggalangan Unit Politik Satintelkam Polres Magelang sebagai berikut:

-
- a. Melakukan penggalangan secara langsung dari hasil laporan informasi Unit Intelkam Polsek

Unit Intelkam Polsek hanya memiliki anggota 1-2 orang dengan wilayah hukum yang sangat luas dan ada beberapa kecamatan yang terdapat lebih dari 1 desa yang melaksanakan Pilkades. Tentu hal ini berpengaruh pada keobjektifan laporan informasi dan perkiraan cepat karena Unit Intelkam Polsek tidak bisa mencapai seluruh lini masyarakat. Maka dari itu, perlu adanya peran aktif Unit Politik Satintelkam Polres Magelang untuk terjun langsung ke lapangan sebagai bentuk penggalangan lanjutan untuk memastikan lingkungan masyarakat kondusif. Program penggalangan lanjutan ini bertujuan agar Unit Politik Satintelkam memastikan langsung kondisi masyarakat dan bisa mengeksplorasi lebih luas pada desa tersebut.

- b. Memperhatikan kerawanan desa melalui hasil Pulbaket

Penggalangan intelejen harus memiliki sasaran yang tepat untuk memperoleh hasil Kamtibmas yang kondusif. Dalam rangkaian kegiatan Pilkades, Unit Politik harus mampu mencuri langkah awal yaitu dengan mengumpulkan data kerawanan dari laporan hasil pelaksanaan Pilkades tahun 2016 dan 2019. Selain itu, terdapat laporan informasi dari Unit Intelkam Polsek terkait situasi dan kondisi desa yang melaksanakan Pilkades di sektor wilayahnya. Berdasarkan dua sumber tersebut, Unit Politik Satintelkam Polres Magelang harus melakukan penggalangan intelejen yang lebih intensif pada daerah rawan terjadi konflik yang berpotensi dapat mengganggu pelaksanaan Pilkades dan melakukan aktivitas yang dapat mengganggu kondusifitas Kamtibmas.

4.2.2.4 Pengendalian (*Controlling*)

Pengendalian penggalangan Unit Politik Satintelkam Polres Magelang dilakukan secara bertahap dan berjenjang oleh Kepala Unit Politik Satintelkam Polres Magelang, Kepala Satuan Intelkam, dan user utama yaitu Kapolres Magelang. Pengendalian sangat penting sebagai

bentuk pengawasan terhadap kinerja anggota dan memberikan evaluasi atas penggalangan yang dilakukan. Bentuk pengendalian yang dilakukan pada Unit Politik Satintelkam yaitu dengan adanya Acara Arahan Pimpinan (AAP) sebelum kegiatan, pelaporan dari *Whatsapp* sebagai pengendalian pelaksanaan penggalangan, dan evaluasi pelaksanaan penggalangan dilakukan oleh Kasatintelkam secara mingguan. Penulis menganalisa permasalahan dari pengendalian dan pengawasan terhadap kinerja Unit Politik Satintelkam Polres Magelang dan memberikan pemecahan masalah sebagai berikut:

- a. Kehadiran Kasatintelkam atau Kanit Politik Satintelkam di lapangan masih sangat kurang

Menurut penulis, perlunya kehadiran Kasatintelkam dalam pengendalian penggalangan intelegen Unit Politik Satintelkam Polres Magelang pada kegiatan Pilkades dibedakan menjadi 2 kegiatan, yaitu pada saat penggalangan Unit Politik yang dilakukan di masing-masing desa dan pada saat pelaksanaan pemungutan suara Pilkades. Pada saat penggalangan di masing-masing desa, dapat dilakukan pembagian wilayah, untuk desa dengan kerawanan yang tinggi perlu kehadiran dari seorang Kasatintelkam sedangkan pada desa dengan masyarakat kondusif dapat diwakilkan oleh Kanit Politik Satintelkam Polres Magelang. Fungsi dari kehadiran Kasatintelkam memberikan kemudahan untuk mendekati diri dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat serta panitia penyelenggara Pilkades.

- b. Laporan administrasi intelegen Unit Politik Satintelkam secara resmi untuk Kasatintelkam

Laporan administrasi intelegen berupa laporan informasi, perkiraan cepat, dan laporan hasil pelaksanaan sangat penting sebagai bukti pelaksanaan penggalangan Unit Politik Satintelkam Polres Magelang. Fenomena yang terjadi pada Unit Politik Satintelkam Polres Magelang yaitu pelaporan hasil pelaksanaan penggalangan hanya berdasarkan format *Whatsapp*. Penggunaan

teknologi ini memang memudahkan dalam kecepatan pelaporan dan tidak menjadi masalah apabila laporan administrasi intelejen segera disusulkan. Namun, pada Unit Politik Satintelkam Polres Magelang laporan yang dikirimkan kepada Kepala Unit Politik maupun Kepala Satintelkam Polres Magelang cenderung hanya dibaca sekilas. Berikut adalah contoh pelaporan via *Whatsapp* dari hasil kegiatan pemungutan suara Pilkades yang tidak dibuatkan administrasi intelejennya.

Pemecahan masalah dari fenomena laporan via *Whatsapp* ini yaitu dengan perintah dari Kasatintelkam Polres Magelang untuk memberikan tenggang waktu maksimal administrasi diselesaikan di hari pelaksanaan penggalangan intelejen supaya Kasatintelkam dapat monitor dan memberikan perintah selanjutnya.

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan masalah yang dilakukan oleh penulis terkait penulisan Tugas Akhir dengan judul “Upaya Penggalangan Unit Politik Satintelkam guna Mewujudkan Keamanan dan Ketertiban Pemilihan Kepala Desa di Wilayah Hukum Polres Magelang”, maka penulis memperoleh simpulan sebagai berikut:

5.1.1 Sumber daya organisasi Unit Politik Satintelkam Polres Magelang

a. Unsur Sumber Daya Manusia (*Man*)

Secara kuantitas, jumlah personel Unit Politik Satintelkam berdasarkan DSP Polres Magelang seharusnya berjumlah 11 orang yang dipimpin oleh Kepala Unit dengan pangkat Inspektur Polisi Dua (IPDA). Begitu juga secara kualitas, dapat dilihat dari kompetensi personel yang masih belum baik berdasarkan data riwayat pendidikan pengembangan spesialis (Dikbangspes). Dari 7 personel Unit Politik Satintelkam Polres Magelang, hanya terdapat 3 orang yang telah melaksanakan Dikbangspes. Bahkan, seorang Kepala Unit pun belum melaksanakan Dikbangspes.

b. Unsur Anggaran (*Money*)

Ketidaksesuaian anggaran yang diberikan dimana dalam DIPA Unit Politik Satintelkam Polres Magelang tertulis anggaran penggalangan dengan indeks 8 kali pelaksanaan penggalangan. Namun, secara faktual total pelaksanaan kegiatan penggalangan intelejen pada tahun 2022 oleh Unit Politik Satintelkam yaitu sebanyak 21 kali.

c. Unsur Sarana dan Prasarana (*Material*)

Sarana akomodasi berupa kendaraan R2 dan R4 masih digunakan secara bergantian oleh seluruh personel Satintelkam Polres Magelang. Tidak ada kendaraan yang digunakan untuk masing-masing unit karena jumlahnya yang sangat terbatas, padahal untuk

menjangkau wilayah Kabupaten Magelang terutama pada kegiatan penggalangan intelejen diperlukan sarana transportasi yang memadai.

d. Unsur Metode (*method*)

Pelaksanaan penggalangan intelejen belum sesuai dengan pasal 1 angka 7 Perkabik Nomor 3 Tahun 2013 terkait kegiatan intelejen seperti tidak dilaksanakannya penggalangan intelejen sebagai rutinitas keseharian. Mengingat bahwa Pilkades adalah kegiatan pesta demokrasi dengan kerawanan yang tinggi, maka dari itu perlu adanya penggalangan intelejen sejak dini dan dilaksanakan dengan rutin oleh Unit Politik Satintelkam Polres.

5.1.2 Sistem Metode Kerja Unit Politik Satintelkam Polres Magelang

a. Perencanaan (*planning*)

Perencanaan yang dilakukan oleh Unit Politik Satintelkam Polres Magelang masih belum optimal karena belum bisa melakukan analisa sasaran dengan efektif sebagaimana dijelaskan pada pasal 25 ayat (1) Perkabik Nomor 3 Tahun 2013.

b. Pengorganisasian (*organizing*)

Pengorganisasian yang dilaksanakan Unit Politik Satintelkam dilakukan sesuai tempat tinggal anggota Unit Politik sehingga menguasai secara khusus wilayah desa dan keadaan masyarakat desa yang menjadi atensi dengan tingkat kerawanan tinggi.

c. Pelaksanaan (*actuating*)

Pelaksanaan penggalangan yang dilakukan Unit Politik Satintelkam Polres Magelang tidak diawali dengan rencana penggalangan yang baik dalam pengumpulan bahan keterangan (Pulbaket). Akibatnya, dalam pelaksanaan penggalangan Unit Politik hanya berdasarkan urgensi dari laporan masyarakat, tetapi dilaksanakan secara rutin.

d. Pengendalian (*controlling*)

Pengendalian pelaksanaan penggalangan idealnya dilakukan oleh Kanit Politik yang kemudian diteruskan kepada Kasatintelkam untuk dilakukan pengawasan pelaksanaan tugas penggalangan. Namun, fungsi Kanit Politik tidak dilaksanakan sebagai pengendali anggota di lapangan. Selain itu, pengawasan dari Kasatintelkam pun hanya dilakukan via grup *whatsapp* tanpa adanya evaluasi kegiatan.

5.2 Saran

Hasil dari simpulan penelitian yang dilakukan penulis, maka perlu adanya beberapa saran untuk penggalangan Unit Politik Satintelkam guna memujudkan keamanan dan ketertiban Pilkades tahun 2022. Saran ini memiliki tujuan agar penggalangan intelegen Unit Politik Satintelkam Polres Magelang lebih optimal sehingga pada pelaksanaan Pilkades berikutnya tidak terjadi gangguan Kamtibmas.

5.2.1 Sumber daya organisasi Unit Politik Satintelkam Polres Magelang

- a. Disarankan kepada Kapolres Magelang terkait penyusunan organisasi Satuan Intelkam agar sesuai dengan DSP yang berlaku pada Perpol Nomor 2 Tahun 2021. Dalam hal peningkatan kualitas personel Unit Politik Satintelkam, disarankan kepada Kapolda Jawa Tengah dan Ro SDM Polda Jawa Tengah agar lebih memperhatikan kualitas personel melalui pendidikan pengembangan spesialis kepada anggota Unit Politik Satintelkam Polres Magelang.
- b. Disarankan kepada Kasatintelkam Polres Magelang untuk mengolah DIPA anggaran Satintelkam Polres Magelang secara optimal mengingat kegiatan penggalangan merupakan kegiatan paling sering dilaksanakan dan membutuhkan anggaran operasional yang lebih dibandingkan kegiatan intelegen lainnya.
- c. Disarankan kepada Kasatintelkam Polres Magelang untuk mengajukan sarana kendaraan R4 untuk operasional pelaksanaan tugas intelegen kepada Kapolres Magelang. Hal ini untuk memenuhi kebutuhan kendaraan R4 masing-masing unit Intelkam untuk menjangkau wilayah Kabupaten Magelang yang sangat luas.

-
- d. Disarankan kepada Kepala Unit Politik Satintelkam Polres Magelang untuk memperbaiki metode pelaksanaan penggalangan terkait Pilkades yang hanya mengandalkan hasil Pulbaket Polsek. Saran dari penulis ini langsung diterapkan dengan aktif mengajak anggota Unit Politik untuk melaksanakan penggalangan di desa dengan kerawanan yang tinggi, misalnya pada Desa Grabag, Desa Sengi, Desa Banaran, Desa Mertoyudan, Desa Salaman.

5.2.2 Sistem Metode Kerja Unit Politik Satintelkam Polres Magelang

- a. Disarankan kepada Kasatintelkam Polres Magelang agar Unit Politik bukan hanya mengandalkan anggota Unit Intelkam Polsek karena jumlah anggota tidak bisa menjangkau seluruh wilayah desa. Perlu adanya tindak lanjut dari Unit Politik Satintelkam untuk melaksanakan penggalangan dari hasil Pulbaket tersebut.
- b. Disarankan kepada Kepala Unit Politik Satintelkam Polres Magelang agar melakukan pengorganisasian anggota berdasarkan radius terdekat antara tempat tinggal masing-masing anggota dengan desa yang melaksanakan Pilkades sehingga Pulbaket dan penggalangan intelejen ketika anggota Unit Politik Satintelkam berada di tempat tinggalnya.
- c. Disarankan kepada Kepala Unit Politik Satintelkam Polres Magelang agar tidak melaksanakan penggalangan intelejen hanya karena kejadian insidental. Namun, penggalangan harus dilaksanakan secara rutin karena pendekatan masyarakat sangat penting dalam rangkaian kegiatan Pilkades terutama pada desa memiliki kerawanan tinggi memerlukan penggalangan yang lebih intensif.
- d. Disarankan kepada Kepala Unit Politik Satintelkam dan Kasatintelkam Polres Magelang agar melakukan pengendalian 3 tahap, yaitu AAP sebelum pelaksanaan penggalangan, monitor secara aktif terkait hasil pelaksanaan penggalangan agar dibuat administrasi intelejen segera jangan hanya laporan via *whatsapp*, dan melakukan evaluasi atas hasil pelaksanaan penggalangan. Selain itu, Kasatintelkam dan Kepala Unit Politik Satintelkam harus monitor secara *mobile* pada saat pelaksanaan kegiatan pemungutan suara Pilkades untuk melihat situasi kondisi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri Akademi Kepolisian. 2018. *Praktek Fungsi Teknis Binmas untuk Akademi Kepolisian*. Semarang: Akpol.

Lembaga Pendidikan Polri Akademi Kepolisian. 2021. *Pedoman Penelitian Ilmiah Taruna Akademi Kepolisian*. Semarang: Akademi Kepolisian.

Lyle M. Spencer dan Signe M. Spencer. 1993. *Competence at Work: models for superior performance*. New York: John Wiley & Son.

Moelong, J. Lexy. 2019. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT REMAJA ROSDAKARYA

Sugiyono. 2022. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. ALFABETA

Terry, George. 2013. *Prinsip – Prinsip Manajemen*. Jakarta: PT BUMI ASKARA

Peraturan:

Bupati Kabupaten Magelang, *Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa*

Kepolisian Negara Republik Indonesia, *Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Cara Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor Dan Kepolisian Sektor*.

Kepala Baintelkam, *Peraturan Kepala Baintelkam No.3 Tahun 2013 Tentang Penggalangan Intelejen*.

Republik Indonesia, *Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.*

Republik Indonesia, *Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelejen Negara.*

Skripsi:

Kalis, Wiku. 2018. “Optimalisasi Penggalangan Intelejen dalam Mencegah Tawuran Antar Pelajar SMA di Polresta Bogor Kota”. Skripsi. Semarang: Akademi Kepolisian.

Nuzul, Ari. 2018. “Peran Satuan Intelkam dalam Melaksanakan Penggalangan Intelejen guna Mencegah Radikalisme di Polres Purwakarta”. Skripsi. Semarang: Akademi Kepolisian.

Ramadhan, Deriel. 2019. “Peran Sat Intelkam dalam Pelaksanaan Penggalangan Intelijen guna Mencegah Pelanggaran Pemilu Presiden 2019 Di Kabupaten Magelang”. Skripsi. Semarang: Akademi Kepolisian.

Jurnal:

Ampouw, Debby Sophia Handayani (2021). Implementasi Unsur Manajemen 4m Pada Pelayanan Jasa Rias Pengantin Di Fauziah Fatma Make Up Artist Dan Wedding Service. *e-journal*. Volume 10 Nomor 2 Tahun 2021, Hal 110-120.

Website:

Berita Magelang, http://beritamagelang.id/indeks-kerawanan-pemilu-kabupaten-magelang-termasuk-rawan_g.id), diakses pada 19 Desember 2022.

Jogja Tribun News, <https://jogja.tribunnews.com/2019/09/29/kerusuhan-di-kota-magelang-20-orang-ditetapkan-sebagai-tersangka-sebagian-besar-anak-anak>, diakses pada 15 Oktober 2022.

Jogja Tribun News, <https://jogja.tribunnews.com/2022/12/07/25-kepala-desa-di-kabupaten-magelang-dilantik-ini-pesan-bupati>, diakses pada 19 Desember 2022